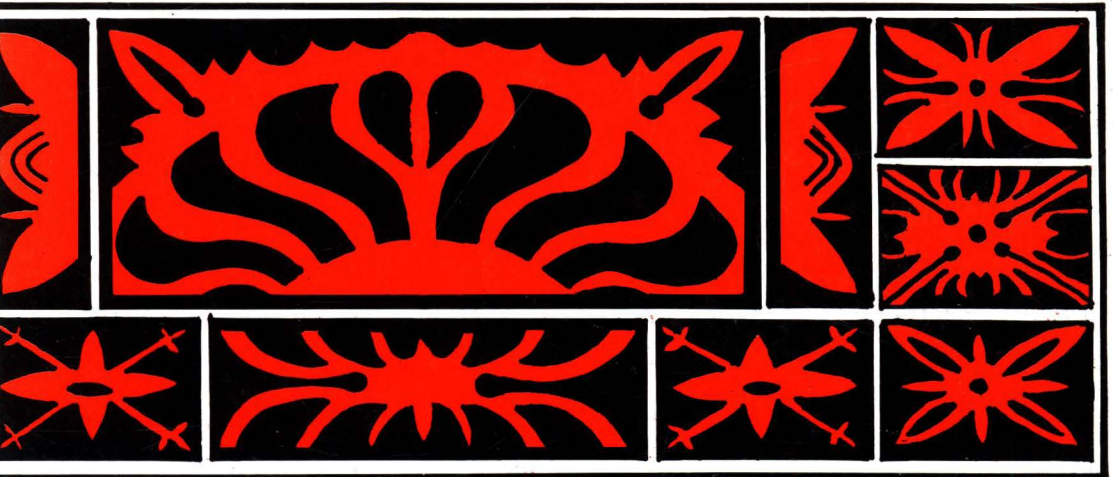




Milik Dep. DIKBUD.
Tidak diperdagangkan

PERAN PENDIDIKAN DALAM PEMBINAAN KEBUDAYAAN NASIONAL DI WILAYAH KELURAHAN JAGAKARSA



Direktorat
dayaan

PARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

370.8
NAS
P

MILIK DEPDIKBUD
TIDAK DIPERDAGANGKAN

**PERAN PENDIDIKAN DALAM PEMBINAAN
KEBUDAYAAN NASIONAL
DI WILAYAH KELURAHAN JAGAKARSA**

TIM PENELITIAN / PENULIS :

1. Drs. ABD. NASHIR : Ketua Aspek
2. Kasman Sigalingging : Anggota

EDITOR

Drs. H.AS. Nasution

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BAGIAN PROYEK PENELITIAN PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 1993 / 1994

P R A K A T A

Bagian Proyek Penelitian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (P3NB) DKI Jakarta yang sebelumnya bernama Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (IPNB) DKI Jakarta yang telah menggali dan mencetak naskah-naskah kebudayaan daerah DKI Jakarta demi nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan pancasila demi tercapainya ketahanan nasional dibidang sosial budaya.

Pada tahun anggaran 1993/1994 Bagian Proyek Penelitian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya DKI Jakarta mencetak naskah hasil penelitian tahun 1992/1993 berjudul :

"Peran Pendidikan dalam Pembinaan Kebudayaan nasional di wilayah Kelurahan Jagakarsa".

Dengan diterbitkannya buku ini, tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan bimbingan Bapak Direktur Ditjarahnitra, Bapak Gubernur KDKI Jakarta beserta aparatnya, Bapak Pemimpin Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Pusat, Bapak Ka. Kanwil Depdikbud DKI Jakarta dan seluruh Tim Peneliti serta semua pihak yang telah berperan serta sehingga berhasilnya penerbitan buku ini.

Sudah barang tentu buku ini masih terdapat beberapa kekurangan baik isi maupun penyajiannya, untuk itu saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat kami harapkan.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi kita semua

Jakarta, Juli 1993

Pemimpin Bagian Proyek P3NB
DKI Jakarta,



Drs. H. AS. NASUTION
NIP. 130232972.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi kepada kami rahmat serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga Proyek P3NB yang berjudul "Peranan Pendidikan Dalam Pembinaan Kebudayaan Nasional di wilayah Kelurahan Jagakarsa" dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dalam mengerjakan penelitian ini kami bekerja satu tim yang terdiri dari Drs. Abd. Nashir dan Kasman Sigalingging.

Dalam proses pengerjaan naskah ini sejak awal rencana penelitian sampai berakhirnya penulisan, banyak mengalami kendala maupun tantangan. Akan tetapi kendala dan tantangan itu dapat dilalui dengan baik. Ini semua berkat bantuan dan bimbingan dari pimpinan Proyek P3NB DKI Jakarta maupun Kepala Bidang Jarahnitra Kanwil Depdikbud DKI Jakarta. Atas bantuan dan bimbingannya kami ucapkan terima kasih.

Ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Lurah Jagakarsa beserta stafnya yang banyak sekali membantu memberikan data maupun informasi lainnya dalam rangka menyusun naskah penelitian ini. Karena di wilayah beliau, penelitian difokuskan. Begitu pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi.

Dalam hal ini kami sangat menyadari bahwa penulisan naskah ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Karena masih banyak kekurangan dan kekeliruan, mengingat terbatasnya waktu dan pengetahuan yang kami miliki. Oleh sebab itu kritik dan saran akan kami terima dengan sepenuh hati dari semua pembaca yang budiman.

Semoga naskah ini bermanfaat bagi kita semua terutama bagi peminat yang ingin lebih mendalami dunia pendidikan di DKI Jakarta ini.

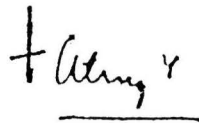
Jakarta, Maret 1993

Tim Peneliti

**KATA SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

1. Bahwa budaya suatu bangsa merupakan kekayaan dan sekaligus merupakan jati diri bagi bangsa yang bersangkutan. Khasanah budaya bangsa Indonesia sedemikian tinggi, baik keluhurannya, jumlahnya, jenis maupun corak ragamnya. Kesemuanya itu merupakan kekayaan yang harus dipelihara, dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
2. Salah satu pendekatan untuk mewujudkan butir 1 diatas adalah menulis dan atau membukukannya untuk kemudian disebar-luaskan.
3. Oleh karena itu saya hargai dan sambut baik kegiatan Bagian Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (P3NB) DKI Jakarta yang menerbitkan naskah yang menggambarkan "Peran Pendidikan dalam Pembinaan Kebudayaan nasional di wilayah Kelurahan Jagakarsa"
4. Saya memahami bahwa materi dari naskah buku tersebut masih jauh dari pada lengkap dan sempurna. Oleh karena itu setiap upaya dari manapun datangnya dan bermaksud menyempurnakan, jelas akan disampaikan terima kasih dan penghargaan.
5. Akhirnya semoga penerbitan naskah ini mencapai tujuannya.

Jakarta, Medio Juli 1993



Drs. H. TATING KARNADINATA
NIP. 130055833.

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	i
KATA PENGANTAR	iii
KATA SAMBUTAN KAKANWIL DEPDIKBUD	v
SAMBUTAN DIRJEN KEBUDAYAAN	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Permasalahan	2
1.3. Tujuan	2
1.4. Ruang lingkup	3
1.5. Pertanggungjawaban penelitian	4
BAB II. GAMBARAN UMUM KELURAHAN JAGAKARSA	5
2.1. Lokasi dan keadaan daerah	5
2.2. Keadaan Alam/Fisik	7
2.3. Kependudukan	8
2.4. Pendidikan	11
2.5. Ekonomi	12
2.6. Agama	14
2.7. Politik	16
BAB III. DESKRIPSI DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN	17
3.1. Faktor penghambat	23
3.2. Faktor penunjang	26
BAB IV. DESKRIPSI DILINGKUNGAN EKONOMI	29
4.1. Faktor penghambat	35
4.2. Faktor penunjang	36
BAB V. DESKRIPSI DI LINGKUNGAN KEAGAMAAN	37
5.1. Faktor penghambat	39
5.2. Faktor Penunjang	40
BAB VI. DESKRIPSI DILINGKUNGAN POLITIK	43
6.1. Faktor penghambat	44
6.2. Faktor penunjang	45
BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN	47
7.1. Kesimpulan	47

7.2. Saran	50
DAFTAR KEPUSTAKAAN	51
DAFTAR RESPONDEN	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Telaah tentang hubungan peran Pendidikan Dalam Pembinaan Kebudayaan Nasional sangat erat sekali. Hal ini merupakan konsekuensi logis dimana peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang merupakan dari konsep kebudayaan, begitu eratnya. Karena berkembangnya suatu kebudayaan tidak terlepas dari unsur atau peran pendidikan.

Salah satu pengertian tentang Konsep pendidikan ialah merupakan suatu proses yang panjang dan mencakup keseluruhan yang dipelajari, baik secara formal maupun informal yang dapat menghasilkan kebudayaan bagi individu, membentuk kepribadiannya, dan sosialisasi dari dirinya yang keseluruhannya melengkapi dirinya untuk hidup sebagai masyarakat (Beals and Hoijer, 1959 : 630). Pengertian pendidikan dalam hal ini tidak saja mengacu pada lingkungan sekolah, akan tetapi termasuk pendidikan dilingkungan keluarga, dan juga lingkungan masyarakat. Bahkan pendidikan dilingkungan keluarga merupakan proses awal seorang individu dalam memasuki kehidupannya.

Peran pendidikan dalam kaitan pada pembinaan hubungan kebudayaan Nasional khususnya dalam mencari faktor hambatan dan dukungan dalam pengejawantahannya merupakan tujuan dari penelitian ini. Karena Kebudayaan Nasional itu seperti yang termuat dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 adalah hasil usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya. Artinya setiap individu mengetahui seluruh Kebudayaan daerah yang puluhan bahkan ratusan jumlahnya. Sehingga didalam kehidupannya diharapkan dapat beradaptasi dengan lingkungan pergaulannya.

Apalagi di DKI Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan juga kota Kebudayaan yang banyak didatangi atau dihuni oleh berbagai etnik nusantara bahkan warga manca negarapun hidup saling berinteraksi satu sama lain di DKI Jakarta. Kebudayaan daerah yang didukung oleh warga negara saling berdampingan dengan warga daerah lainnya. Bahkan tidak mustahil terjadi proses asimilasi satu etnik dengan etnik lainnya melalui proses perkawinan. Sehingga nantinya diharapkan tidak terjadi adanya perasaan atau paham kedaerahan yang sempit dan dapat membuat rasa persatuan dan kesatuan porak poranda.

Dengan lahirnya UU no. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, maka arus pendidikan semakin jelas dan terpadu. Antara pendidikan umum dan pendidikan “agama” atau madrasah tidak di pertentangkan lagi. Dalam Bab I Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa : Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Dep dik bud, 1989 : 6).

1.2. Permasalahan.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam golongan etnik, golongan agama, golongan ekonomi, golongan pendidikan, dan golongan politik yang berbeda latar belakang sejarah dan kebudayaannya. Dengan adanya perbedaan latar tersebut, proses transformasi kebudayaan nasional melalui jalur pranata keluarga, sekolah dan masyarakat tidak semulus seperti apa yang di bayangkan. Terbukti masih adanya unsur primordialis dan ethnocentrism dalam takaran atau ukuran bermasyarakat.

Padahal, proses transformasi kebudayaan nasional bertujuan untuk kemajuan adab ,budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya bangsa sendiri. Serta mempertinggi derajat kemajuan bangsa.

1.3. Tujuan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung pengejawantahan nasional yang di transformasikan melalui jalur pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kebijaksanaan (policy research) dibidang Kebudayaan.

1.4. Ruang Lingkup.

Dengan ruang lingkup yang dimaksud adalah batasan kerja untuk menggambarkan peran pendidikan dalam pembinaan Kebudayaan Nasional, Khususnya tentang :

- a. Lingkungan pendidikan.
- b. Lingkungan ekonomi.
- c. Lingkungan keagamaan.
- d. Lingkungan politik.

Penelitian tentang masalah tersebut dilakukan diwilayah kelurahan Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Pemilihan lokasi itu di rasakan cukup representatif mengingat beberapa masalah yang di ajukan ada di lokasi Jagakarsa ini.

Studi perpustakaan di lakukan sebelum penelitian , dan ini merupakan langkah awal dari kegiatan tim. Hal ini di lakukan karena tim merasa perlu di bekali kerangka teoritis yang selanjutnya sangat berguna bagi penulisan laporan penelitian. Penelitian sendiri dilakukan pada Agustus, di mana tim secara serentak namun secara terpisah mewawancarai beberapa responden yang di nilai dapat mewakili secara keseluruhan sasaran penelitian. Bulan berikutnya tim membuat laporan masing-masing, selanjutnya diolah dan terakhir di tuangkan dalam bentuk naskah.

Secara garis besar, isi naskah tersebut dapat di kemukakan sebagai berikut :Bab I pendahuluan, dalam bab ini dibicarakan tentang latar belakang, masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, dan pertanggung jawaban penelitian; Bab II Gambaran umum, bab ini membicarakan lokasi penelitian, keadaan alam/fisik, kependudukan, kependidikan, ekonomi agama, dan politik; Bab III Deskripsi di lingkungan pendidikan yang meliputi faktor penghambat dan penunjangnya; Bab IV Deskripsi di lingkungan ekonomi yang juga meliputi faktor hambatannya maupun penunjangnya.

Dalam bab berikutnya yaitu Bab V tentang Deskripsi di lingkungan Keagamaan, juga tidak lupa membahas faktor hambatan dan penunjangnya. Sedangkan Bab VI menggambarkan lingkungan politik , faktor hambatannya

dan pendukungnya. Sedangkan Bab VII merupakan bab kesimpulan dan juga memuat saran-saran.

1.5. Pertanggung Jawaban Penelitian.

Penelitian ini dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari seorang Ketua dibantu dua orang anggotanya. Pada tahap persiapan Ketua bertanggung jawab membuat rencana penelitian untuk selanjutnya diusulkan kepada pimpinan proyek. Setelah disetujui, usulan penelitian itu dilengkapi.

Untuk melengkapi rencana penelitian ini, tim membicarakan langkah-langkah yang akan dibahas. Langkah pertama yang dibahas adalah permasalahan pokok penelitian yang masih perlu dimantapkan. Setelah pokok permasalahan disepakati tim membicarakan langkah-langkah selanjutnya yaitu mengenai metode yang digunakan berikut penentuan jadwal penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Untuk itu diperlukan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan terlibat dan study kepustakaan yang menunjang tema penelitian ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM KELURAHAN JAGAKARSA

2.1 Lokasi dan keadaan Daerah.

Kelurahan Jagakarsa terletak di wilayah kecamatan Jagakarsa. Kelurahan ini adalah salah satu diantara “6” Kelurahan yang ada di Kecamatan Jagakarsa, wilayah kota Jakarta Selatan. Kelurahan Jagakarsa berbatasan langsung dengan Jawa Barat yaitu desa Pangkalan Jati Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor.

Untuk mencapai wilayah kelurahan Jagakarsa ini dapat menggunakan kendaraan umum, baik dari terminal Pasar Minggu maupun terminal Lebak Bulus. Kendaraan umum dari arah terminal Pasar Minggu yang melewati kawasan kelurahan Jagakarsa adalah Mikrolet dengan nomor M17 dan M36. Sedangkan kendaraan umum dari arah terminal Lebak Bulus yang melewati wilayah kelurahan Jagakarsa adalah minibus nomor S02.

Luas kelurahan Jagakarsa asal mulanya kurang lebih 576,247 Ha. Akan tetapi berdasarkan surat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1251 tahun 1986 tertanggal 30 Oktober 1986, tentang pemecahan, penyatuan wilayah, penggantian nama kelurahan yang kembar, maka luas wilayah kelurahan Jagakarsa berkurang menjadi 485,00 Ha.

Adapun batas wilayah Kelurahan Jagakarsa yang luasnya 485,00 Ha sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kelurahan Cilandak Timur, Kelurahan Ragunan, dan Kelurahan Kebagusan (Jalan Margasatwa, Jalan Sagu dan Jalan Haji Mursid).

- Sebelah Timur : Kelurahan Ciganjur dan kelurahan Srengseng Sawah (Jalan Kelapa Tiga, Jalan Jagakarsa).
- Sebelah Barat : Wilayah Kelurahan Pondok Labu dan desa Pangkalan Jati Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor (Kali Krukut).
- Sebelah Selatan : Wilayah Kelurahan Ciganjur dan Kelurahan Srengseng Sawah (Jalan Moh. Kafi II dan jalan Kebembem).

Ditinjau dari status tanah Kelurahan Jagakarsa yang luasnya 485.000 Ha yang terdiri dari :

- Tanah Milik Adat : 353.296 Ha.
- Tanah Negara : 17.764 Ha.
- Tanah wakaf : 81.500 Ha.
- dll : 32.440 Ha. (lihat tabel II. 1)

Tabel II.1.
Luas Wilayah Kelurahan Jagakarsa
Berdasarkan Status Tanahnya.

No.	Status tanah	Luas (Ha)
1.	Tanah Negera	17.764
2.	Tanah Milik Adat	353,296
3.	Tanah Wakap	81,500
4.	Lain-lain	32,440
Jumlah		485.000

Sumber : Laporan Tahunan Kelurahan Jagakarsa, 1992.

Dengan demikian tanah milik adat jauh lebih baik dan luas dari tanah negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa penduduk Kelurahan Jagakarsa masih banyak terdiri dari penduduk asli yang memiliki tanah secara turun temurun dari leluhurnya.

Kondisi jalan diKelurahan Jagakarsa termasuk kategori kelas III. Jalan tersebut termasuk jenis jalan ekonomi yang panjangnya 31,5 km. Jalan ini merupakan jalan penghubung antara kelurahan Jagakarsa dan Kelurahan sekitarnya dengan lebar 6 meter. Jalan ini memakai aspal dan merupakan urat nadi bagi para pedagang untuk memasarkan dagangannya kepasar Minggu.

Sedangkan jalan yang belum diaspal dan masih dalam bentuk tanah diperkeras dengan pasir batu panjangnya 28,5 Km. Jalan ini menghubungkan antara lingkungan diwilayah kelurahan Jagakarsa.

Oleh karena jalan-jalan di wilayah kelurahan Jagakarsa ini hanya dilalui oleh kendaraan umum jenis mikrolet, dan itupun penumpang kendaraan umum itu sering penuh, maka masyarakat setempat banyak yang menggunakan kendaraan “ojeg” sepeda motor sebagai alat Transportasi.

Para warga Kelurahan Jagakarsa yang ingin ke Pasar Minggu, biasa menggunakan kendaraan “ojeg” sampai didepan Stasiun Kereta Api Lenteng Agung (Jalan Raya Lenteng Agung). Kedua dari Jalan Raya Lenteng Agung mereka menggunakan Kendaraan Umum (omprengan) Mikro bus jurusan Pasar Minggu Depok.

2.2 Keadaan Alam/fisik.

Secara geografis, tanah Kelurahan Jagakarsa terletak 50 meter diatas permukaan laut, dengan suhu rata-rata 27-derajat Celsius. Curah hujan rata-rata 2000 Milimeter setiap tahun. Daerah ini menjadi relatif sejuk dibandingkan dengan daerah lain karena masih banyak jenis pohon-pohonan yang sekaligus menjadikan daerah resapan air bagi kota Jakarta.

Disana-sini masih banyak terdapat lahan yang kosong. Lahan tersebut banyak ditumbuhi pohon-pohon seperti pohon durian, jambu air, rambutan, dan lain-lain. Sekeliling rumah penduduk masih terdapat pohon-pohon yang rindang dan tanaman hias.

Menurut Laporan Tahunan Kelurahan Jagakarsa Tahun 1992, tercatat bahwa penggunaan tanah untuk pertanian seluas 231.000 Ha, perumahan 177.750 Ha, fasilitas umum 40.400 Ha, industri 0.250 Ha, pemakaman 4.400 Ha, Jalan Raya lingkungan 31.200 Ha. Lihat Tabel II.2).

Tabel II. 2.
Luas Wilayah Kelurahan Jagakarsa
Menurut Peruntukan Tanah

No.	Peruntukan tanah	Luas (Ha)
1.	Perumahan	177,750
2.	Industri	0,250
3.	Fasilitas Umum	40,400
4.	Pemukaman	4,400
5.	Jalan Raya/Lingkungan	31,200
6.	Pertanian	231,000
	J u m l a h	485,000

Sumber : Laporan Tahunan Kelurahan Jagakarsa, 1992.

Jika dilihat dari laporan tersebut, maka lahan pertanian lebih dari 50% dari luas jumlah lahan yang ada yaitu, 485,000 Ha, ini berarti bahwa daerah Kelurahan Jagakarsa agak renggang penduduknya. Lahan pertanian disini adalah lahan pertanian buah-buahan, oleh sebab itu suasana daerah ini agak sejuk, karena dikiri-kanan jalan ditumbuhi pohon-pohon yang rimbun daunnya.

Sarana penerangan telah dijangkau oleh perusahaan listrik negara (PLN). Hampir seluruh rumah penduduk menggunakan sarana listrik. Apabila pada malam hari terjadi pemadaman listrik, maka para penduduk menggunakan lilin atau lampu petromak sebagai alat penerang.

Jalan-jalan raya pada malam hari diterangi oleh lampu listrik baik yang disediakan oleh pemerintah maupun oleh penduduk terutama didepan rumah-rumah, sedangkan dibawah tidak ada penduduk seperti kebun-kebun yang ada disepanjang jalan, suasana gelap sekali. Karena disamping tidak ada penerangan lampu, juga pohon-pohon yang rindang menutupi cahaya dari langit. Sehingga pada malam hari suasana terasa gelap sekali.

2.3. Kependudukan.

Hampir dipastikan penduduk Keluarga Jakarta masih banyak penduduk aslinya yaitu suku Betawi. Tetapi karena kota Jakarta sebagai ibukota negara

RI, maka Kota Jakarta merupakan milik seluruh warga masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu banyak pendatang yang mendiami wilayah ini.

Menurut Laporan Tahunan kelurahan Jagakarsa, 1992 pada bulan April 1992 tercatat 25.783 jiwa yang terdiri dari :

laki-laki : 13.444 orang

Perempuan : 12.339 orang.

Mereka tinggal di 7 Rukun Warga (RW), yang terdiri dari 77 Rukun Tetangga (RT). Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini.

TABEL II.3
Komposisi Penduduk
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kewargaan Negara Kelurahan Jagakarsa
April 1992

No.	Umur	WNI		Jumlah
		Lk	Pr	
1.	0 - 4	1.675	1.629	3.304
2.	5 - 9	1.149	1.137	2.286
3.	10 - 14	1.157	1.149	2.306
4.	15 - 19	1.136	1.187	2.323
5.	20 - 24	1.138	1.133	2.271
6.	25 - 29	1.094	1.073	2.167
7.	30 - 34	1.089	1.064	2.153
8.	35 - 39	1.089	1.047	2.136
9.	40 - 44	1.039	1.020	2.059
10.	45 - 49	1.015	864	1.879
11.	50 - 54	866	508	1.374
12.	55 - 59	470	238	708
13.	60 - 64	225	154	378
14.	65 - 69	137	67	204
15.	70 - 74	117	54	171
16.	75 Keatas	48	15	63
	Jumlah	13.444	12.339	25.783

Sumber : Laporan Tahunan Kelurahan Jagakarsa, 1992

Adapun orang yang datang ke Kelurahan Jagakarsa dari bulan April 1991 sampai Maret 1992 tercatat 1.955 orang. Sedangkan yang pindah tercatat 302 orang. Mengenai angka Kematian tercatat 53 orang. Sedangkan angka Kelahiran berjumlah 473 jiwa.

Datangnya penduduk dari luar ke Kelurahan Jagakarsa ini merupakan Konsekuensi logis dari Jakarta sebagai ibukota negara RI. Wilayah lainpun yang ada di Jakarta ini keadaannya sama. Apalagi pada masa kini terutama daerah-daerah di kawasan pusat kegiatan bisnis, seperti Kawasan jalan Jenderal Sudirman maupun di daerah Kuningan, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, banyak para penduduk yang terkena penggusuran tanah permeter dapat mencapai jutaan rupiah. Akhirnya banyak penduduk tersebut pindah ke Kelurahan Jagakarsa ini. Oleh sebab itu tidak mengherankan bila banyak bangunan penduduk yang bagus. Karena harga tanah di wilayah Kelurahan Jagakarsa ini sampai tahun 1992 ini sekitar Rp. 200.000/meter.

Sedangkan penduduk yang berasal dari luar DKI Jakarta yang menetap di Kelurahan Jagakarsa adalah orang-orang yang ingin merubah nasibnya, seperti buruh musiman, pedagang keliling dsb. Mereka ini tinggal di rumah kontrakan. Ada juga para pencari kerja yang datang ke Jakarta ini, khususnya para pemuda yang tamatan Sekolah SLTA Ke bawah. Bahkan diantara mereka ada juga yang sudah menamatkan perguruan tinggi. Biasanya mereka tinggal di Jakarta ini di rumah saudaranya, atau juga teman satu kampung.

Wilayah Kelurahan Jagakarsa disekitarnya banyak terdapat perguruan tinggi, seperti Universitas Indonesia (UI) yang letaknya didesa Pondok Cina, Depok. Begitu juga Universitas Pancasila, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) yang dulu terkenal dengan sebutan Sekolah Tinggi Ilmu Publisistik letaknya diwilayah Kelurahan Lenteng Agung tidak jauh letaknya dari Kelurahan Jagakarsa.

Sedangkan diwilayah Kelurahan Jagakarsa sendiri terdapat perguruan Tinggi yaitu Akademi Pertamanan (Aperta), Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK), Akademi Teknis Desain Interior (ATDI). Ketiga Akademi itu dibawah naungan Yayasan Pro Patria.

Akibat adanya beberapa Perguruan Tinggi di Jagakarsa dan sekitarnya, banyak terdapat rumah tempat "kost" maupun kontrakan yang diperuntukan bagi para mahasiswa yang berasal dari luar kota. Dengan demikian mereka itu seakan-akan warga masyarakat Jagakarsa.

Adapun penduduk yang agak padat terdapat dilokasi Rukun Warga (RW) 01. Lokasi wilayah ini letaknya lebih strategis yaitu dekat jalan raya Lenteng Agung, yang menghubungkan kawasan Pasar Minggu dengan wilayah Pondok Cina, Depok. Kawasan RW 01 ini transportasinya lebih mudah dibandingkan dengan Rw lainnya. Oleh sebab itu tidak mengherankan bila RW01 ini penduduknya lebih padat.

Sedangkan wilayah yang agak jarang penduduknya adalah Rukun Warga 06. Hal ini disebabkan lokasinya lebih terpencil dari jalan raya. Transportasi di RW 06 ini agak sukar. Yang ada hanya berupa kendaraan “ojeg” motor.

2.4. Pendidikan

Jenjang pendidikan di kelurahan Jagakarsa ini mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi. Jenjang TKseluruhnya dikelola oleh swasta dan juga Perguruan Tingginya. Sedangkan jenjang pendidikan dasar seperti Sekolah Dasar (SD) termasuk Madrasah Ibtidaiyah, tingkat SLTP termasuk Madrasah Tsanawiyah, dan tingkat SLTA dikelola oleh pemerintah dan swasta.

Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) ada 6 buah, Sekolah Dasar (SD) 14 buah, Madrasah Ibtidaiyah 4 buah, SMTP 5 buah, Madrasah Tsanawiyah 1 buah. Sedangkan SLTA 3 buah, dan Akademi Perguruan Tinggi 1 buah. (Lihat tabel II.4).

Tabel II.4
JUMLAH FASILITAS SEKOLAH DI
KELURAHAN JAGAKARSA

No	Jenis Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	-	6	6
2.	Sekolah dasar	14	-	14
3.	Madrasah Ibtidaiyah	1	3	4
4.	SLTP	3	2	5
5.	Madrasah Tsanawiyah	1	-	1
6.	SLTA	1	2	3
7.	Akademi/Univ	-		1

Sumber : Laporan Tahunan Kelurahan Jagakarsa, 1992.

Disamping lembaga pendidikan formal, Kelurahan Jagakarsa mempunyai juga jenis pendidikan non formal yaitu pendidikan Kursus, yaitu Kursus Montir Mobil, kursus kecantikan dan kursus tari.

Biasanya yang menempuh/mengikuti pendidikan non formal ini adalah orang-orang yang tidak melanjutkan sekolahnya. Diharapkan setelah menempuh kursus tersebut, mereka dapat menciptakan lapangan kerja atau sekurang-kurangnya hidupnya lebih mandiri.

Bagi penduduk Jagakarsa yang sudah menyadari arti pentingnya Pendidikan, para orang tua berusaha dengan kemampuan yang ada untuk menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin, meskipun setelah sekolah nanti belum tentu akan mendapatkan langsung pekerjaan.

Menurut keterangan dari Pegawai Kelurahan Jagakarsa tentang warga yang tamat Sekolah, bahwa warga yang berpendidikan atau tamat Sekolah Dasar sekitar 25%, tamatan Sekolah Menengah Tingkat Pertama 30%, tamatan Sekolah Menengah Tingkat Atas 60%, dan Tamatan Universitas Perguruan Tinggi sebesar 5%. Ini dapat diartikan bahwa kesadaran masyarakat Kelurahan Jagakarsa akan pendidikan tinggi sekali.

2.5. Ekonomi

Tingkat ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tingkat pendapatannya. Tingkat pendapatan merupakan tolok satu ukuran dalam melihat suatu masyarakat apakah dapat disebut makmur atau belum. Tingkat kemakmuran suatu dapat dilihat secara nyata dengan melihat kebutuhan mereka akan sandang, pangan dan papan.

Disamping itu sumber daya alam, buatan atau manusia sering kali terbatas, sehingga tidak semua sumber daya dapat diperbaharui (renewable), tetapi yang habis terpakai (unrenewable), jika tidak menghemat dalam pemakaiannya.

Untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik, manusia membutuhkan sumber daya alam, buatan, dan manusia. Karena jumlah manusia semakin banyak, sedangkan sumber daya yang dibutuhkan terbatas, maka sering kali mengaktifkan persaingan diantara kelompok kecil (sub groups) yang mempunyai kepentingan dengan kelompok (vested interest) yang lebih besar (groups). Dalam persaingan tersebut kadang kala diantara kelompok yang bersaing menggunakan segala cara (homo homini lupus) untuk memperoleh keuntungan bagi kelompoknya dengan cara mengabaikan kepentingan kelompok lain.

Meningkatkan jumlah penduduk serta menyempitnya lahan diwilayah DKI Jakarta memungkinkan adanya pergeseran kegiatan kerjanya. Demikian

halnya Kelurahan Jagakarsa, yang semula masih dikelilingi oleh lahan pertanian, sekarang sudah beralih menjadi areal pemukiman penduduk. Hal ini membawa dampak perubahan pola kerja warga Kelurahan Jagakarsa. Semula mereka adalah umumnya petani, sekarang mereka ada yang menjadi pedagang, buruh, pegawai negeri, dll.

Latar belakang ekonomi warga Kelurahan Jagakarsa beraneka ragam. Ada warga yang termasuk dalam golongan kaya, terutama dapat dilihat dari jenis bangunan rumahnya, mempunyai kendaraan pribadi (mobil, dan sepeda motor) serta perlengkapan dalam rumah tangga yang lengkap. Namun demikian ada warga yang digolongkan sederhana/miskin. Kondisi bangunannya semi permanen atau bahkan darurat, perlengkapan rumah tangga secukupnya.

Menurut data dari kelurahan Jagakarsa tentang bangunan penduduknya yang permanen berjumlah 494 buah, semi permanen 1293 buah, dan bangunan sedang/darurat 1757 buah. Walaupun lahan pertanian cukup besar di Kelurahan Jagakarsa, akan tetapi kebutuhan akan beras tidak dapat dari lahan itu. Umumnya warga setempat membeli beras diwarung yang ada disekitar rumahnya, ataupun juga dipasar Jagakarsa, dan ada juga yang membeli di Kopersi serba usaha Jagakarsa

Adapun mata pencaharian warga Kelurahan Jagakarsa menunjukkan beraneka ragam. Jenis mata pencaharian yang paling besar jumlahnya adalah bertani, kemudian disusul oleh pegawai negeri sipil, pedagang, buruh, dan lain-lain. (Tabel II 5.).

Tabel II.5
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN DI
KELURAHAN JAGAKARSA

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Tani	1226
2.	Pedagang/Pengusaha	755
3.	Buruh	645
4.	Pegawai Negeri Sipil	2323
5.	ABRI	483
6.	Pensiun	245
7.	Lain-lain	180
JUMLAH		5857

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Jagakarsa, 1992.

Pengangguran dalam pengertian tidak mendapat upah, tidak terimbitarisir dalam hal ini. Umumnya pengangguran ini adalah para pemuda yang baru lulus dari sekolah. Masalah pengangguran merupakan masalah nasional.

Salah satu upaya mengurangi masalah pertumbuhan penduduk yang lebih besar dibandingkan terbatasnya persediaan lapangan kerja dan juga kesejahteraan masyarakat adalah Kebijaksanaan Program Keluarga Berencana (KB). Dalam hal ini Kelurahan Jagakarsa dalam program KB dari Pembina Kesehatan cukup baik.

Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) telah lama dilaksanakan oleh aparat Kelurahan Jagakarsa beserta petugas Kesehatan dari Pus Kes Mas. Untuk menunjang program KB, telah dibangun PUS KES MAS, pos Kesehatan RW 7 buah, Posyandu 28 buah, pihak Swastapun turut membantu dalam menunjang program KB dan kesehatan lainnya, seperti penyediaan rumah bersalin sebanyak 2 buah, poliklinik 3 buah, bidan 6 orang, praktek dokter 4 orang, apotik 1 buah, dan dukun beranak 7 orang.

2.6. Agama

Umumnya masyarakat Kelurahan Jagakarsa terutama penduduk asli menganut agama Islam. Agama Islam telah dianut secara turun temurun sebagai agama leluhurnya. Dan untuk mempertahankan agama Islam masyarakat betawi jarang mau menyekolahkan anaknya disekolah umum, karena kuatir akan menjadi Kristen. Keadaan semacam itu sewaktu jaman penjajahan Belanda.

Memang pada waktu masa penjajahan Belanda Sekolah umum lebih banyak dikelola oleh orang-orang Belanda dan juga masyarakat yang beragama Kristen. Salah satu bentuk penyebaran agama Kristen pada waktu itu melalui dunia pendidikan.

Setelah masa kemerdekaan maupun masa kini, masyarakat Betawi tidak hanya memilih sekolah-sekolah agama saja, akan tetapi mereka sudah memasuki sekolah-sekolah umum. Banyak diantara orang-orang Betawi yang sudah lulus dari Perguruan Tinggi Umum, seperti dari fakultas Kedokteran, Teknik, Sospol dan lain-lain. bahkan diantara masyarakat Betawi ada yang memasuki dunia Kemiliteran.

Adapun warga masyarakat Jagakarsa yang beragama selain Islam, adalah agama Kristen Katolik, Protestan, dan Budha. Umumnya masyarakat yang beragama non Islam adalah masyarakat diluar etnis Betawi, seperti masyarakat yang berasal dari Sumatra Utara (Batak), yang beragama Kristen Protestan, masyarakat Cina yang beragama Budha.

Menurut Laporan Tahunan Kelurahan Jagakarsa sampai bulan April 1992 tercatat bahwa prosentase agama Islam sebesar 90%, agama Katolik 3%, agama Protestan 6%, Hindu dan Budha 1%. Sarana Ibadah untuk umat Islam seperti masjid, dan Musholla banyak terdapat diwilayah Kelurahan Jagakarsa. Sedangkan sarana ibadah umat beragama selain Islam tidak terdapat. Seperti umat Kristen Protestan dan Katolik mereka melakukan kebaktiannya diluar wilayah Jagakarsa. Mereka umumnya melakukan kebaktian diwilayah Kelurahan Srengseng Sawah dan Cilandak. Karena didua wilayah tersebut terdapat bangunan Gereja.

Toleransi keagamaan di wilayah Kelurahan Jagakarsa ini cukup tinggi. Hal ini terlihat dari laporan pihak Kelurahan tentang tidak adanya ketegangan antar umat beragama. Dalam pergaulan sesama warga tidak dibedakan apa agama yang dianutnya.

Dalam upaya memajukan sajian agama Islam, masyarakat Kelurahan Jagakarsa telah membangun 9 buah Masjid, dan 22 buah Musholla. Untuk mengisi Masjid maupun Musholla itu selain untuk sarana ibadah sholat, juga diadakan pengajian dan majlis ta'lim. Kegiatan pengajian dan majlis ta'lim yaitu kegiatan memperdalam Ilmu Pengetahuan Agama Islam seperti ilmu Tauhid (Ke esaan Tuhan), Fiqih (Hukum Islam), dan juga Tafsir Al Qur'an dan Hadist Nabi.

Pengajian maupun majlis Ta'lim biasanya dipimpin oleh seorang guru agama yang biasanya disebut Ustad atau Kyai. Biasanya Ustad maupun Kyai itu berasal dari luar wilayahnya. Kegiatan pengajian dan Majlis Ta'lim ini diadakan pada waktu malam hari yaitu mulai waktu shalat magrib sampai waktu sholat isya.

Dengan adanya pengajian dan majlis ta'lim tersebut, diharapkan masyarakat yang beragama Islam dapat lebih menghayati ajaran agamanya agar menjadi manusia yang beruntung, baik didunia maupun dialam akhirat kelak. Harapan semacam itu merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia yang terdapat (tercantum) dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)

Didalam GBHN dicantumkan bahwa pembangunan nasional Indonesia adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya, material dan spiritual. Dan ini merupakan sesuai dengan ayat Al Qu`ran yang merupakan pedoman bagi umat Islam, dimana dalam salah satu ayat al Qur'an di terangkan yaitu bahwa mintalah kehidupan didunia keberuntungan dan juga keberuntungan (Kebaikan) diakhirat.

2.7. Politik

Politik erat kaitannya dengan tatacara meraih kekuasaan, serta upaya mempertahankan kekuasaan dengan wewenang yang dimilikinya. Oleh karena itu, seorang penguasa dapat menggunakan seluruh kekuasaannya untuk mempertahankan status quo yang dimilikinya.

Pranata politik telah diajarkan didalam lingkungan keluarga dimana seorang anak diharapkan tunduk dan patuh kepada kedua orang tuanya. Jika anak tersebut tidak mengikuti norma-norma yang diciptakan didalam keluarga itu, maka anak tersebut akan dikenakan sanksi sosial yang bertujuan untuk memelihara keteraturan dalam kehidupan keluarga.

Dilingkungan sekolah/pendidikan tinggi, siswa/mahasiswa juga diajarkan pranata politik yang berlaku dilingkungan sekolah/pendidikan tinggi itu, sebagai contoh, seorang guru atau dosen merupakan orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang dalam mengambil keputusan apakah siswa/mahasiswa tersebut lulus/tidak lulus dalam mata pelajaran/matakuliah yang diajarkannya.

Demikian pula halnya dimasyarakat, kelihatannya orang lebih mudah membuat peraturan dari pada menjalankan peraturan itu sendiri. Peraturan dibuat untuk kepentingan orang banyak, sedangkan norma-norma sosial yang berlaku dibuat untuk kepentingan kelompok orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang dalam mengatur pembagian sumber daya untuk kepentingan orang banyak.

Dalam kaitannya dengan pemerintah, wilayah Kelurahan Jagakarsa dipimpin oleh seorang Lurah. Jumlah pegawainya sebanyak 19 orang, ditambah 2 orang dari Dinas Kependudukan, 1 orang dari Dinas Kebersihan, dan 2 orang dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Pada pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1992 untuk DPRD Tingkat I, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh suara 25,63%. Golongan Karya (GOLKAR) 52,14%, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) 22,23 %. Sedangkan untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat, PPP memperoleh 26%, GOLKAR 52%, dan PDI 22%.

Dengan demikian, GOLKAR keluar sebagai pemenang dalam pemilu tersebut. Did daerah lainnya juga GOLKAR sebagai pihak yang menang dalam pemilu, bahkan diseluruh propinsi nusantara. Tradisi kemenangan GOLKAR sejak masa Orde Baru (ORBA) dimulai sejak tahun 1971 dimana pada waktu itu pemilu pertama sejak masa Orde Baru, dan pemilu kedua sejak lahirnya Republik Indonesia. Sedangkan pemilu pertama diadakan pada tahun 1955.

BAB III

Deskripsi di Lingkungan Pendidikan

Tak dapat disangkal bahwa pendidikan merupakan wahana terpenting untuk mencapai kemerdekaan dan sekaligus untuk meningkatkan kemampuan bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui pembangunan. Bahwa setiap kali orang berbicara tentang tenaga kerja “siap pakai”, pendidikan sekolah selalu menjadi tumpuan.

Sekolah merupakan proses pendidikan formal yang berlangsung dari tingkat Sekolah Dasar bahkan sekarang mulai dari Tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi. Pendidikan formal disekolah merupakan bagian dari proses pendidikan secara keseluruhan.

Pendidikan Dasar bertujuan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan dengan memberi pengetahuan dasar dan keterampilan dasar untuk bekal selanjutnya di pendidikan menengah.

Pendidikan menengah bertujuan mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik antara lingkungan sosial budaya dengan alur sekitarnya, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.

Pendidikan tinggi menyelenggarakan pendidikan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dan atau kesenian, melakukan penelitian dibidang iptek, dan melaksanakan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara (Lihat PP No. 28. Tahun 1990).

Dalam mengisi alam kemerdekaan ini, pihak pemerintah bersama-sama masyarakat (swasta), ikut berpartisipasi dalam membangun masyarakat Jakarta pada khususnya, baik melalui penyediaan sekolah-sekolah yang ratusan jumlahnya serta kursus-kursus keterampilan yang tersebar diseluruh wilayah kota.

Adapun jumlah TK (Taman Kanak-Kanak) di DKI Jakarta sebanyak 1724 buah, Sekolah Dasar (SD) baik negeri maupun swasta berjumlah 3519 buah, jumlah SLTP negeri dan swasta mencapai 1153 buah, sedangkan jumlah SLTA nya 972 buah, dan jumlah kursus-kursus yang ada 959 buah (Kanwil Dep dikbud DKI Jakarta, 1991:1).

Selain itu masih terdapat jenis pendidikan yang kadang-kadang disebut sebagai sekolah “agama”. Sekolah-sekolah ini dibawah naungan Departemen Agama, sekolah yang dinaungi oleh Departemen Agama disebut Madrasah.

Jenjang Sekolah Dasar disebut Ibtidaiyah, Sekolah Lanjutan Pertama (Tsanawiyah), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas adalah Aliyah. Jumlah Ibtidaiyah di DKI Jakarta 493 buah baik negeri maupun swasta. Sedangkan Tsanawiyah 196 buah, dan Aliyah 68 buah. (Jakarta dalam angka, 1991: 106-109).

Selain itu masih model pendidikan yang merupakan ciri khas pendidikan “asli” bangsa Indonesia yaitu Pesantren. Pendidikan Pesantren ini merupakan suatu lembaga pendidikan yang relatif tertua di Indonesia yang mampu bertahan dan terus berkembang hingga saat ini. Akan tetapi sedikit sekali masyarakat mengenal lembaga ini.

Sejarah pendidikan nasional lebih mengenal atau lebih sering mengemukakan gerakan pendidikan Ki Hadjar Dewantoro dengan Taman Siswanya, atau K.H. Achmad Dachlan dengan Muhammadiyahnya, dan hampir tak pernah mengungkapkan pola pendidikan dipondok-pondok pesantren yang sudah berpuluh tahun ada di tengah masyarakat Pedesaan Indonesia. Padahal Jutaan penduduk desa telah memasuki proses pendidikan melalui sejumlah puluhan ribu pondok-pondok Pesantren yang tersebar di pulau Jawa, bahkan sejak jauh sebelum ada gerakan perjuangan nasional untuk kemerdekaan Indonesia.

Di DKI Jakarta jumlah pesantren 17 buah yang tersebar di 5 wilayah kota (Jakarta dalam angka, 1991,op.cit). Pesantren ini dikelola oleh pihak

swasta dan dipimpin oleh pemuka agama (islam) yang bergelar “kyai”. Para kyai ini merupakan tokoh informal dalam masyarakat. Mereka juga sebagai tokoh agama. Masyarakat Betawi biasanya lebih menghargai para tokoh informal ini dibandingkan tokoh formal, seperti para pejabat pemerintah. Oleh sebab itu masyarakat Betawi yang sudah tua umumnya lebih mengenal ilmu pengetahuan agama dibandingkan ilmu pengetahuan umum (duniawi).

Bila kita menengok kepada masa lalu yaitu masa Kolonial Hindia Belanda, pendidikan diarahkan kepada penciptaan koorps pegawai rendahan untuk kepentingan pemerintah kolonial, dan kebutuhan niaga ekspor komoditi sumber alam mentah untuk kepentingan negeri Belanda (A.K. Pringgodigdo, 1980:X-XI; Abdurrachman Wahid, 1984:XV). Dan yang tak kalah pentingnya adalah bahwa pendidikan yang “sekuler” pada masa kolonial menurut Van Der Prijs adalah untuk membentengi Belanda dari Volkano Islam (Sartono Kartodirdjo, 1976:125).

Adapun sekolah yang mula-mula diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda kepada masyarakat pribumi ialah Sekolah Kelas Dua, yang akan mendidik calon-calon pegawai rendahan. Sedangkan untuk anak-anak golongan masyarakat atas adalah jenis Sekolah Kelas Satu. Disamping itu ada pula sekolah rendah yang disediakan bagi anak-anak Eropa. Sedangkan untuk masyarakat desa sejak awal abad 20 diperkenalkan sistem sekolah desa atau Volksschool (Ibid).

Untuk keperluan anak-anak dari kelas atas, didirikan pula HIS (Holandsch Inlandsche School). Dalam sekolah ini bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda, lama sekolah ini 7 tahun. Bagi murid yang pandai dan juga orang tuanya cukup mampu dalam hal keuangan, dapat melanjutkan sekolahnya ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs). Dan dari sini dapat meneruskan ke AMS (Algemene Middelbare School). Jika nasib baik dapat meneruskan kesekolah tinggi. (Ibid).

Adapun jenis sekolah lainnya seperti Sekolah Guru (Kweek Scool dan Hogere Kweek School), OSVIA (Opleideng School Voor Inlandsche Ambtenaren) sekolah untuk menjadi pegawai (birokrat). Sedangkan jenis sekolah untuk masyarakat Belanda dan Eropa lainnya adalah ELS (Europe Lager School). Bila seorang murid pribumi ingin bersekolah kelingkungan “Belanda” di sediakan jenis sekolah yang disebut Schakel. Disini murid pribumi diharuskan mempelajari bahasa Belanda dan beradaptasi dengan lingkungannya (Ibid; 126)

Dari perluasan dan pendidikan inilah ditemukan akar dari perubahan sosial yang mempengaruhi elit Indonesia. Dengan bertambah luasnya kekuasaan Belanda, kebutuhan akan birokrasi Indonesia yang berpendidikan Barat bertambah besar. Bila sebelumnya kedudukan-kedudukan tinggi dalam hirarki kepegawaian Indonesia diberikan atas dasar asal-usul keturunan, politik kolonial yang baru membuat pendidikan sebagai suplemen pada asal keturunan, dan dalam ukuran waktu dan keadaan tertentu pendidikan dijadikan sebagai ukuran utama (Robert Van Niel, 1984:75).

Sekolah dalam pengertian umum sebenarnya tidaklah begitu asing dalam tradisi bangsa Indonesia. Pesantren, Madrasah, Surau dan berbagai jenis sekolah agama sudah lama dikenal. Tradisi sekolah ini tetap berlanjut, sekalipun telah ada pilihan-pilihan lain. Pesantren dan Madrasah merupakan jenis sekolah yang coraknya bertolak belakang dengan sekolah yang diperkenalkan pemerintah, baik dari isi pengajaran, cara pendidikan, maupun dari kemungkinan yang bisa diharapkan oleh seorang anak didik.

Sejak tahun 1920-an setapak demi setapak telah mulai ada perubahan dari beberapa Pesantren dan Madrasah yang umumnya digerakkan oleh kaum reformis Islam. Sekolah agama yang didirikan oleh golongan agama ini mulai memakai sistem baru dan memperkenalkan berbagai jenis-jenis pengajaran umum. Kedua macam sekolah agama ini di beberapa daerah merupakan sekolah swasta yang paling penting.

Salah satunya sekolah agama yang ada di Batavia (Jakarta) adalah sekolah Jamiat Khair yang terletak dikawasan Tanah Abang. Sekolah ini didirikan pada tahun 1905. Sekolah ini tidak semata-mata mempelajari ilmu agama, melainkan juga mempelajari ilmu-ilmu umum seperti berhitung, ilmu bumi, sejarah. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Sedangkan bahasa Belanda tidak diajarkan dan sebagai penggantinya adalah bahasa Inggris (Deliar Noer, 1980:69).

Dari sekolah inilah menghasilkan murid-murid yang pandai yang tersebar di Jakarta yang akhirnya mendirikan madrasah-madrasah. Mereka juga pada akhirnya sebagai tokoh-tokoh pejuang dikemudian hari.

Sedangkan sekolah swasta yang sudah begitu tersebar adalah Tamansiswa, Muhammadiyah, dan INS (Indonesian Nederlandsche School), Kayu tanam. Sekolah umum swasta ini dapat dibedakan antara yang mengikuti

sejauh mungkin corak serta sifat dari sekolah pemerintah dan bersubsidi dan yang dengan sadar mencari sifat lain.

Sekolah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara adalah usaha yang paling jelas dalam usaha memberi dasar ideologi bagi sekolah. Demikian juga sekolah umum Muhammadiyah berdasarkan nilai-nilai agama Islam sebagai ideologinya bagi para murid. Begitu juga INS kayu tanam yang didirikan oleh M. Syafei di Sumatra Barat, semua itu bersifat nasionalis yang anti kolonial.

Dengan sifatnya yang anti kolonial tersebut, sekolah-sekolah tersebut dikategorikan sebagai sekolah liar. Untuk menghalangi sekolah-sekolah tersebut pemerintah ingin membuat undang-undang Wilde Scholen, yakni ordonansi sekolah liar pada tahun 1932, akhir Undang-Undang tersebut tidak dijalankan oleh pemerintah, karena adanya penentangan. oleh anggota -anggota Volksraad (A.K. Pringgodigdo, op.cit;136).

Pada sisi lain pendidikan sebagai “bumerang” bagi pihak kolonial. Karena dari sinilah munculnya gerakan-gerakan kebangsaan untuk mengusir kaum penjajah dari bumi Indonesia, meskipun belum berhasil pada waktu itu.

Akhirnya gerakan politik yang di jalankan oleh kaum nasionalisme Indonesia menemui jalan buntu, hingga penyerbuan Jepang tahun 1942 yang memberikan kesempatan baru untuk hidup (Robert Van Niel, op-cit;323).

Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan mengalami gambaran buruk. Bila dibandingkan pada masa pemerintahan Belanda jumlah sekolah dasar 21.500, menjadi 13.500, sedangkan jumlah sekolah lanjutan dari 850, menjadi 20 (Sartono Kartodjo, op.cit;172).

Jenjang pendidikan Sekolah Dasar hanya satu macam yakni Sekolah dasar 6 Tahun. Sedangkan pada masa Kolonial Belanda bermacam-macam. Alasannya sekolah dasar dijadikan satu macam ini adalah guna lebih mudah pengawasan baik isi maupun hal penyelenggaraannya. Penyeragaman tersebut menguntungkan pihak pribumi yaitu menghapuskan diskriminasi (Sartono Kartodirjo, ibid;172).

Dalam merebut hati bangsa Indonesia, pihak Jepang memperkenankan penggunaan bahasa Indonesia sebagai pengganti bahasa Belanda, baik sekolah, kantor pemerintah, surat menyurat (Sagimun, 1988:419-420). Begitu pula

yang terpenting diberi kepercayaan pihak Islam dalam berpartisipasi, terutama dengan didirikan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) pada akhir tahu 1943 (Harry J. Benda, 1980:24).

Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, bahasa Jepang diajarkan juga. Bahkan bahasa Jepang sebagai mata pelajaran wajib. Para pelajar juga diharuskan menghormati adat kebiasaan Jepang, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang **Kimigayo**, serta melakukan penghormatan ke arah istana kaisar di Tokyo dan bendera Jepang dan melakukan gerak badan (pendidikan Jasmani) yang disebut Taiso (Sartono Kartodirjo, op. cit: 173).

Dimasa pemerintahan militer Jepang ini, semua perguruan tinggi/fakultas ditutup, walaupun kemudian ada beberapa yang dibuka kembali, seperti Perguruan Tinggi Kedokteran (Ika Daigaku) di Jakarta (April 1943), Perguruan Tinggi Teknik (Kogyo Daigaku) di Bandung (Sartono Kartodiryo, ibid), meskipun bidang pendidikan pada masa Jepang ini mundur rada salah satu nilai yang sangat tinggi yaitu dijadikannya bahasa Indonesia sebagai pengantar yang kemudian kelak menjadi bahasa nasional rakyat Indonesia.

Dengan menyerahnya Jepang dari Sekutu, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan Kemerdekaan. Dalam kaitan dengan hal pendidikan, pemerintah RI membentuk Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Hal ini sesuai dengan pasal 31, UUD 45 yang berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Tujuan pendidikan dan pengajaran diarahkan pada usaha membimbing para murid, agar menjadi warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab. Semua sekolah harus terbuka untuk setiap warga negara. Karena pada masa kolonial Belanda, tiap lapisan sosial mempunyai sekolah sendiri-sendiri. Artinya pada masa itu tidak semua orang yang dapat bersekolah. (Sartono Kartodirjo, ibid : 267).

Pendidikan terbagi atas 4 tingkatan : pendidikan rendah, pendidikan pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Pendidikan rendah lamanya 6 tahun, sekolah lanjutan pertama 3 tahun, dan pendidikan lanjutan atas 3 tahun. Sedangkan pendidikan Tinggi lamanya 4 hingga 6 tahun, bahkan dapat lebih lama lagi.

Setelah lahirnya Orde Baru, maka pemerintah berupaya menggarap pendidikan secara Integratif yaitu dengan dilahirkannya UU. No.2 tahun 1989

tentang sistem pendidikan nasional. Dalam UU tersebut dikatakan tentang pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan Jasmani dan Rohani, keperibadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa (Depdikbud, 1989:8).

Ternyata yang berlaku dilingkungan masyarakat adalah bahwa tujuan pendidikan adalah untuk kerja. Ini sudah disinyalir oleh salah seorang pakar Pendidikan Amerika Serikat (AS) bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah untuk mencari nafkah (C. Arnold Anderson, t.t :17).

3.1. Faktor Penghambat.

Pada masa penjajahan faktor penghambat pendidikan adalah tidak semua orang dapat bersekolah. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan terbatas sekali, yang dapat bersekolah adalah orang-orang yang berasal dari lapisan tertentu, seperti kalangan bangsawan. Disini ada faktor diskriminasi.

Begitu juga pada masa pendudukan Jepang, kesempatan bersekolah hampir tidak ada. Karena suasana keamanan tidak terjamin. Pada masa waktu sedang berkecamuknya perang Dunia II. Jangankan untuk bersekolah, kesempatan untuk hidup saja sulit sekali, karena rakyat Indonesia diperintahkan untuk membantu Jepang menghadapi musuhnya yaitu Sekutu. Disini termasuk para pemuda, pelajar diperintahkan untuk menjadi heiho, Tentara Pembebasan Tanah Air (PETA).

Pada masa Kemerdekaan hambatan pendidikan tetap ada. Apalagi sewaktu awal kemerdekaan, kesempatan untuk bersekolah, sedikit sekali. Karena pada waktu itu rakyat Indonesia menghadapi pasukan NICA (Pasukan Belanda) yang ingin menjajah lagi. Para pelajar juga selain belajar, juga memanggul senjata untuk menghadapi pasukan Belanda. Oleh sebab itu ada kelompok pelajar yang bergabung menjadi Tentara Pelajar (TP), Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP).

Faktor penghambat pendidikan pada masa kini seperti terbatasnya anggaran, kecenderungan adanya "komersialisasi" pendidikan pada sekolah-sekolah swasta, Adanya sekolah yang kekurangan murid akibat keberhasilan program Keluarga Berencana (KB), sementara daerah lainnya justru kelebihan murid khususnya pada sekolah-sekolah negeri.

Dan yang tak kalah penting faktor penghambat pendidikan adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para guru. Disamping itu pula adanya pemotongan gaji guru oleh oknum yang tidak proporsional.

Dalam penelitian di Kelurahan Jagakarsa, faktor penghambat pendidikan adalah masalah transportasi, belum diangkatnya sebagai guru menjadi pengajar tetap tetap, dan masih adanya lingkungan jalan yang belum diaspal.

.Dalam hal transportasi, para pelajar umumnya menggunakan kendaraan umum, jenis mikrolet. Akan tetapi umumnya kendaraan tersebut tidak mau/jarang mau mengangkut para pelajar. Karena para pelajar membayar ongkosnya hanya Rp100; sedangkan penumpang umum lainnya membayar RP 300;. Alasan itulah yang menghalangi kelancaran para pelajar dalam menuju kesekolah.

Konsekwensinya adalah para pelajar harus berjalan pada pagi hari sekali. Karena mereka harus berjalan menuju kesekolah sejauh sekitar 3km dari jalan Raya Lenteng Agung kewilayah Jagakarsa yang merupakan lokasi sekolahnya. Kalau mereka terlambat bangun, otomatis mereka akan terlambat. Akibat keterlambatan ini, akhirnya mereka membolos sekolah seperti pergi kepusat-pusat perdagangan (pasar), bioskop atau bergerombol dengan teman-teman lainnya. Dan ini kalau tidak terkontrol, akan menjadi tidak baik jadinya. Karena dengan bergerombolnya para pelajar tersebut, tidak mustahil mereka dapat mengganggu pelajar-pelajar lainnya, bahkan dapat menyebabkan terjadinya perkelahian.

Begitu pula hambatan dari pihak pengajar adalah masih adanya guru honorer. Mereka sudah ada yang lebih dari 2 tahun belum diangkat sebagai guru tetap. Sedangkan guru yang sudah diangkat saja belum cukup ekonominya apalagi guru honorer itu.

Akibatnya banyak para guru yang mengajar lebih dari satu sekolah. Bahkan ada yang mencari pekerjaan sampingan untuk menutupi biaya hidupnya. Ini menyebabkan kosentrasi para pengajar tidak penuh. Kemerossotan pedidikan mungkin disebabkan oleh faktor Kesejahteraan guru yang merupakan salah satu komponen pendidikan.

Faktor penghambat lainnya adalah letak sekolah jauh dari jalan Raya. Kadang kala untuk menuju kelokasi sekolah jalannya "becek" sekali sewaktu musim hujan. Hal ini disebabkan lahan yang ada dipinggir jalan biasanya diperuntukkan untuk sarana perumahan, pertokoan, maupun perkantoran.

Biasanya dalam membangun sarana pendidikan seperti, gedung sekolah, pihak pemerintah terbentur oleh langkanya (jarangnya) lahan kosong di daerah strategis. Untuk mencari lahan yang kosong akhirnya ditemukan lahan yang ada jauh dari jalan raya.

Pada masa ini banyak gedung sekolah milik pemerintah letaknya jauh dari jalan raya. Biasanya letak sekolah tersebut berada di kampung-kampung atau daerah pinggiran. Dan harga tanah di daerah pinggiran itu relatif lebih murah.

Hambatan lainnya adalah di bidang pendidikan persepsi psikologis masyarakat terhadap pendidikan bidang agama, seperti Madrasah, dan pesantren. Masyarakat umumnya menganggap bahwa sekolah "agama" itu hanya untuk akhirat. Disamping itu pula orang yang bersekolah di madrasah menurut pandangan masyarakat tidak dapat bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Mereka yang tamat dari Madrasah hanya menjadi guru ngaji, pengurus Masjid dsb.

Persepsi semacam itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Hal ini pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri, tahun 1975, dimana isi keputusan tersebut antara lain dikatakan bahwa sekolah-sekolah yang dari naungan Departemen Agama, dapat melanjutkan ke sekolah umum di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum madrasah diatur sedemikian rupa yaitu 30% bidang agama, dan 70 bidang umum.

Karena masyarakat tidak tahu tentang SKB 3 menteri itu, maka murid-murid dari madrasah seakan-akan tidak berguna dan disepelkan. Begitu pula dalam penerimaan pegawai ada sebagian pegawai personalia tidak mengetahui apa itu Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, maupun Aliyah. Walaupun kalau ingin obyektif bahwa sekolah "agama" itu madrasah dan pesantren merupakan produk asli pendidikan bangsa Indonesia.

Pengasingan kelas agama (madrasah) dalam masyarakat dan dalam dunia kerja, merupakan warisan pemikiran kolonial Belanda. Sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya sistem pendidikan Barat yang dikembangkan pada waktu kolonial dan juga saran seorang Orientalis Belanda yaitu Snack Hwironje adalah untuk mengalahkan Islam di wilayah jajahan Belanda. (Zamahsyari Dhafier, 1982:38).

3.2. Faktor Penunjang.

Kalau kita ingin melihat dari pembukaan UUD '45 termuat kata-kata "mencerdaskan kehidupan bangsa" yang merupakan salah satu tujuan kita bernegara, maka pendidikan merupakan alatnya . Apalagi pendidikan ini dimuat dalam batang tubuh UUD 1945, pasal 31 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran".

Bahkan seorang pakar pendidikan C. Arnold Anderson menanyakan apa sebabnya para pemimpin negara-negara berkembang sangat mengutamakan pendidikan. Dijawabnya sendiri, pertama bahwa orang harus berpendidikan untuk dapat mencapai kemajuan teknologi dan ekonomi. Untuk memperbesar produksi bahwa makanan, menjalankan pabrik-pabrik, menerapkan ilmu pengetahuan guna peningkatan taraf hidup, berdagang dipasaran dunia, suatu negara haruslah memiliki sejumlah orang yang dilatih baik.

Kedua, pendidikan di perlukan untuk menyatukan sejumlah orang dan sejumlah suku menjadi satu bangsa. Manusia tidak mungkin mengerti sesama warga negaranya dan meluaskan ikatan kesetiiaanya melampaui lingkungan desa bila mereka tidak dapat saling tetangga bila tetangga itu tidak mempunyai pengertian sedikitpun mengenai apa artinya hidup sebagai suatu bangsa. Apalagi masyarakat Indonesia atau Jakarta yang majemuk ini, tanpa saling mengerti tentang kebudayaan masing-masing dapat menyebabkan salah pengertian bahkan dapat bantutkan satu etnis dengan etnis lainnya.

Ketiga, berlangsungnya suatu negara moderen hanya tergantung pada kemampuan para pegawainya untuk mengkoordinasikan, administrasi yang melingkupi wilayah yang luas. Penanganan tersebut dapat dilakukan oleh para pegawai yang berpendidikan.

Untuk menunjang pendidikan, pemerintah dalam setiap tahun mengeluarkan Anggaran biaya pendidikan melalui APBN dan APBD. biaya tersebut diperuntukkan untuk membangun gedung sekolah, membeli sarana penunjang pendidikan, gaji guru, dan sebagainya

Dalam meningkatkan kemampuan proses belajar mengajar para guru ditingkatkan kualitasnya, seperti penataran, bahkan kalau perlu dikirim keluar negeri untuk menambah ilmu pengetahuannya.

Bahkan faktor penunjang yang ada dikelurahan Jagakarsa sebagai daerah penelitian, seperti gedung sekolah sudah tersedia mulai dari Taman

Kanak-Kanak (TK) sampai perguruan Tinggi. Ini tinggal tergantung masyarakatnya saja apakah ingin maju atau sebaliknya.

Karena pada dasarnya pemerintah bersama-sama masyarakat ikut bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Ini dapat dilihat sekolah-sekolah sebagai pusat pendidikan tidak saja dibangun oleh pihak pemerintah tetapi masyarakatpun ikut berpartisipasi. Bahkan jumlah sekolah-sekolah yang ada di Jakarta lebih banyak jumlahnya yang di bangun oleh masyarakat (swasta) dibandingkan sekolah yang dibangun oleh pihak pemerintah. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran negara.

Apalagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional, beserta penjabarannya seperti peraturan pemerintah (P.P) nomor 27 untuk sekolah dasar, PP no.28 yang mengatur jenjang pendidikan tingkat SLTP dan SLTA, maupun PP no. 29 tentang pendidikan Tinggi. Undang-Undang tersebut merupakan amanat dari UUD 1945, pasal 31 ayat 2 yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang -Undang.”.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut maupun peraturan pemerintahnya sebagai penjabaran operasionalnya, diharapkan kemajuan bangsa Indonesia dalam hal pendidikan semakin bertambah maju. Ini merupakan salah satu alat penunjang pendidikan yang ditunggu-tunggu hampir 4 dasawarsa lamanya.

BAB IV

DESKRIPSI DILINGKUNGAN EKONOMI

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani : Oikos dan Nomos. Oikos artinya rumah, dan Nomos artinya ilmu. Ekonomi berarti ilmu yang mengatur rumah tangga. Bila didefinisikan ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya serta akibat-akibat usaha itu.

Dalam membicarakan tentang lingkungan ekonomi, khususnya secara konsepsional yuridis haruslah merujuk kepada pasal 33 UUD 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peta kekuatan perekonomian Indonesia terdiri dari perusahaan negara, dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Swasta dan Koperasi. Ketiga komponen itu saling melengkapi dan mendukung.

Perusahaan negara bergerak dibidang yang menguasai kebutuhan hidup orang banyak, seperti Pertamina, PLN, Bulog, Perkebunan, Pertambangan dsb. Perusahaan ini dijalankan oleh pegawai pemerintah.

Asal-usul perusahaan negara ini berasal dari warisan kolonial Belanda. Pada masa Kolonial ekonominya negara ditunjang oleh sektor perkebunan, khususnya perkebunan tebu, dan industri gula. Industri gula ini ditopang oleh harga sewa tanah merah, dan upah buruh rendah (Alec Gordon, 1982:39). Sedangkan sektor lain seperti pengeboran minyak sebagai unsur pendukung.

Sedangkan pada masa kemerdekaan khususnya Orde Baru, pola ekonomi kolonial masih tetap diteruskan. Hal ini disebabkan oleh memadainya kekuatan kelas menengah, dan formasi sosial Indonesia sudah terpadu secara mendalam kedalam ekonomi neo Kolonial (Richard Robinson, 1984 : 28).

Sektor ekonomi lainnya adalah yang dikuasai oleh swasta yang dijalankan oleh individu maupun kelompok. Secara Empiris kekuatan ekonomi ini dikuasai oleh etnis non pribumi. Mereka biasanya bergerak ditingkat grosir, agen dan sebagainya. Sedangkan orang pribumi bergerak di sektor eceran.

Terbentuknya kelompok ekonomi swasta cina merupakan produk jaman VOC. Pada waktu itu VOC telah berhasil menggeser wiraswasta dagang pribumi dari kota-kota yang dikuasainya. Oleh karena itu VOC merupakan penguasa, maka ia membutuhkan "orang" sebagai perantara (middlemen) dengan masyarakat pribumi. Yang digunakan sebagai perantaranya adalah orang cina atau orang timur asing, sejak Gubernur Jendral J.P. Coen (Djoko Suryo, 1986:29). Petunjukan masyarakat Cina sebagai perantara oleh pihak kolonial adalah karena tidak membahayakan secara politik. Dengan demikian etnis cina secara turun temurun sudah terbiasa bergerak dibidang ekonomi, khususnya sektor perdagangan. Tradisi menguasai sektor ekonomi perdagangan terus berlangsung sampai pada saat ini.

Bertahannya etnis cina dalam sektor ekonomi dan malah makin berkembang dan makmur karena dua sebab. Pertama, peran merdeka sangat diperlukan dalam pembangunan bentuk ekonomi Indonesia pada tahap kantong produksi barang ekspor sekarang ini, yaitu melalui dominasi mereka pada jaringan distribusi dan kredit domestiknya. Kedua sebagai suatu kesatuan bisnis yang tangguh dan efektif, mereka dilihat oleh kaum teknokrat sebagai suatu motor pertumbuhan ekonomi (Richard Robinson, op.cit : 30).

Lebih penting lagi, kepentingan kelompok bisnis orang cina itu lazimnya terikat pada kepentingan kelompok bisnis finansial kaum birokrat politik yang di manifestasikan dalam sejumlah besar kelompok bisnis yang merupakan pasangan "partnership" antara kekuasaan politik Indonesia dan sumber modal.

pengelolaan dan kerangka organisasi cina. Karena itu para oknum pejabat tidak akan bersemangat untuk memberi perlindungan negara yang kuat pada penguasa pribumi atau melakukan tindakan negara yang efektif melawan cina (Richard Robinson, *ibid* :31).

Pernyataan tersebut dibantah oleh seorang peneliti dan dikatakan justru perekonomian Indonesia di kuasai oleh negara yaitu sebesar 90%. Sisanya lagi sebesar 10% dikuasai oleh sektor swasta, baik cina, pribumi, maupun perusahaan asing (Christianto Wibisono, 1981:29). Menurutnya akibat tidak diperkenankan atau dibatasi menjadi pegawai negeri, ABRI, dan jabatan non-bisnis lainnya, masyarakat cina akhirnya berjubel membuka kios dan menjadi pedagang. Oleh karena itu mitos bahwa etnis cina sebagai superior harus dibuang demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Yang jelas, adalah bahwa kekuatan ekonomi swasta ini adalah bersekutunya pemodal asing, pengusaha cina dan pengusaha pribumi yang mempunyai hubungan dengan para penguasa. Mereka inilah yang memainkan peranan ekonomi dalam kehidupan bangsa.

Dan yang paling menonjol dalam ekonomi sektor swasta ini adalah apa yang disebut dengan perusahaan “plat merah”. Artinya perusahaan yang dijalankan oleh anak pejabat, kerabatnya maupun orang-orang yang dekat dengan penguasa itu. Karena sebagaimana diketahui alokasi anggaran pembangunan yang paling besar dikeluarkan oleh negara. Dan yang mendapat tender proyek, biasanya orang yang paling dekat dengan pejabat yang mengeluarkan surat perintah kerja.

Akan tetapi ketangguhan sektor Swasta ini patut dipertanyakan. Artinya apakah mereka dapat bertahan terus bila “cantelannya” akan ambruk? Karena dalam suatu seminar hal semacam itu terungkap, yaitu bahwa dunia usaha di Indonesia belum memiliki kepemimpinan yang tangguh. Karena pemimpin perusahaan muncul berdasarkan kekuatan kharismanya pribadi yang didukung kontak-kontak pribadi dengan pihak tertentu (Kompas, Rabu, 9 Desember 1992). Oleh karena itu pembangunan ekonomi sekarang ini sedang berproses, maka untuk menilai kuat tidaknya kelompok swasta nasional ini dalam menghadapi arus globalisasi dunia, sejarahlah yang menilai.

Karena kelompok swasta pribumi ini pernah dicoba pada masa “Orde Lama”. Ternyata mereka tidak tahan “bantingan”, hingga terbentuknya kelompok ekonomi baru yang dikatakan orang secara sinis sebagai “orang kaya baru” atau OKB.

Adapun komponen ekonomi Indonesia lainnya adalah sektor koperasi. Sektor koperasi ini merupakan penjabaran dari pasal 33 UUD 1945. Namun berbagai hambatan dan penyimpangan yang terjadi, mengakibatkan kurang mantapnya pengembangan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyatnya yang dibentuk atas dasar peraturan pemerintah dan undang-undang itu. Peraturan Pemerintah (PP) yang mendukung koperasi itu seperti pp no. 60/1959, tentang pengembangan gerakan koperasi. Sedangkan Undang-Undangnya adalah UU no. 79/58, tentang perkumpulan koperasi ditingkat kabupaten kebawah, dan pp 140/6 (Adi Sasono, 1982:39).

Perjalanan koperasi ini sebagai soko guru ekonomi rakyat tidak dapat berjalan. Karena menurut pengamat maupun pakar-pakar ekonomi Indonesia, bahwa sistem ekonomi di Indonesia berlaku sistem kapitalis pinggiran (Sri Tua Arief, Adi Sasono, 1980), atau kapitalis semu (Yoshihara Kanio, 1991). Artinya secara teoritis kita menentang paham tersebut sebagaimana yang termaktub dalam GBHN.

Pada dasarnya konsepsi ekonomi Indonesia adalah ekonomi Pancasila. Kedua sistem ekonomi yang ada didunia ini yaitu sistem ekonomi Kapitalisme maupun sistem ekonomi Sosialisme tidak sejalan dengan GBHN.

Dalam mengamati wilayah Jagakarsa sebagai daerah penelitian ini, lingkungan ekonominya cukup memadai. Menurut laporan Tahunan Kelurahan Jagakarsa, 1992 maupun pengamatan lapangan langsung terdapat 1 pasar inpres, 7 Industri Rotan, Ubin/Batako, 7 toko kelontong, 121 warung langsam, dan 10 pedagang kaki lima.

Pasar inpres di wilayah Kelurahan Jagakarsa bernama pasar inpres Lenteng Agung karena letaknya di jalan raya Lenteng Agung. Oleh karena ada perluasan stasiun dan pelebaran jalan, maka pasar tersebut dipindahkan kepinggir jalan raya Jagakarsa.

Pasar yang merupakan arena sosial yang bersifat umum dimana didalamnya terjadi interaksi sosial antara pedagang dengan pembeli bertujuan mengadakan transaksi pertukaran barang, jasa, ekonomi, dan uang. Tempat Transaksi dapat dilakukan pada waktu itu atau pada waktu lain berdasarkan sistem harga yang ditetapkan.

Pasar inpres Lenteng Agung ini didirikan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta pada tahun 1979. Setahun kemudian 1980, pasar tersebut diresmikan.

Saat dilakukan penelitian pasar tersebut dipimpin oleh bapak Sutarman dengan didampingi oleh 13 orang staf. Staf-staf tersebut bertugas sesuai fungsinya. Ada yang menjadi bagian keuangan, bagian keamanan, dan bagian kebersihan.

Luas arealnya 3000 meter persegi. Jumlah kios 291 buah, yang terdiri dari 252 kios, dan 39 kantor. Yang aktif berdagang hanya 220 kios, sedangkan sisanya kosong. Menurut kepala pasar tentang kosongnya kios tersebut mungkin dianggap kurang cocok bagi pemiliknya, karena letaknya kurang strategis yaitu diluar jalan raya Lenteng Agung yang penuh ramai itu.

Sistem pemilikannya adalah sewa. Harga sewa kios tiap bulannya bervariasi. Harga sewa kios perbulan Rp 13.750; Kalau letaknya disebelah luar harga sewanya di tambah 20%. Sedangkan yang disebelah dalam harganya hanya ditambah 10%. Adapun sewa toko emas dua kali lipat dari harga biasa.

Aktifitas pedagang-pedagangnya mulai jam 05.00 pagi sampai jam 16.00 sore. Mereka biasanya menjual kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, keperluan anak-anak pelajar dan lain-lain.

Biasanya pasar ini ramainya pada hari libur, seperti hari minggu. Sebab masyarakat yang bekerja tidak mempunyai senggang pada hari-hari biasa. Mereka mengajak keluarganya untuk berbelanja. Umumnya berbelanja disini adalah warga masyarakat Kelurahan Jagakarsa dan sekitarnya, seperti warga kelurahan Lenteng Agung, Srengseng Sawah.

Para pedagang berasal dari wilayah Jagakarsa dan sekitarnya. Kebanyakan mereka dari etnis betawi, Jawa, dan Sunda. Sisanya etnis Batak dan Padang. Adapula pedagang Cinanya, terutama bergerak dibidang penjualan logam mulia, yaitu emas.

Adapun Koperasi yang terdapat diwilayah Kelurahan Jagakarsa adalah Koperasi Serba Usaha (KSU), dan Koperasi Pasar (KOPPAS). Koperasi merupakan wadah kegiatan ekonomi yang bersifat sosial, karena kegiatan koperasi tidak bertujuan semata-mata untuk mencari keuntungan. Tetapi lebih mengupayakan kesejahteraan para anggotanya.

Seperti Koperasi pasar yang anggotanya semua pedagang yang ada mempunyai kios sebagai jaminannya. koperasi pasar ini membantu para pedagang dalam memasok barang dagangannya dari bulog (Badan Logistik), seperti terigu, beras, gula dsb.

Adapun Koperasi Serba Usaha (KSU) Jagakarsa, sebagai fokus pembahasan, pada saat dilakukan penelitian diketahui oleh H.M. Saleh Sani, SH yang juga pegawai Kejaksaan RI. Sedangkan pembina (Penasehat)nya adalah langsung bapak Lurah Jagakarsa.

Koperasi Serba Usaha (KSU) ini didirikan sejak tahun 1978. Setelah itu tidak ada lagi kegiatan. Koperasi ini baru mulai aktif lagi tahun 1990. Anggotanya adalah warga Kelurahan Jagakarsa sebanyak 200 orang. Akan tetapi mereka itu tidak aktif seperti tidak membayar iuran. Yang aktif hanya puluhan orang, termasuk para pengurusnya.

Koperasi (KSU) ini bergerak dibidang simpan pinjam. Mengingat modalnya belum mencukupi/ karena tidak membayar iuran para anggotanya. Para pengurus belum berani memberikan pinjaman kepada para anggotanya. Ini pernah terjadi pada periode awal pendirian, dimana banyak para peminjam yang tidak mengembalikan kreditnya. Oleh karena itu Koperasi pada waktu itu mengalami kemunduran.

Dengan kepengurusan yang baru dan ditambah lagi oleh seorang manejer, maka KSU Jagakarsa ini mengalami kemajuan sedikit. Bukti dari kemajuan ini adalah diberi kepercayaan oleh PT. Telkom dalam mengolah telpon umum. Pengelolaan telpon umum itu bukan saja yang ada di Kelurahan Jagakarsa, akan tetapi sampai satu kecamatan (6 Kelurahan).

Bentuk kerja KSU dalam urusan telpon umum adalah membersihkan telpon dari coret-coret, melaporkan telpon yang rusak. Biasanya KSU mendapat komisi sebesar 10% setiap bulannya.

KSU Jagakarsa ini bekerja sama dengan DOLOG DKI Jakarta dalam menjual barang-barang keperluan sehari-hari, seperti beras, tepung terigu, minyak goreng, dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari lainnya. KSU ini bekerja sama dengan KOPPAS Lenteng Agung, seperti apabila habis barang-barang yang dikirim oleh Bulog (Dolog) sedangkan salah satunya masih mempunyai persediaan (Stock), maka dapat di dropnya.

Untuk menarik anggotanya KSU ini memberikan utang dalam bentuk barang (seperti beras, minyak goreng, terigu), terutama kepada warung-warung kecil yang ada dikelurahan Jagakarsa. Dalam menservice anggotanya biasanya barang-barang tersebut diantar langsung kepada anggotanya dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Harganya pun sama seperti harga dari agen (pasar).

4.1.Faktor Penghambat

Beberapa hambatan pada masalah ekonomi diwilayah Kelurahan Jagakarsa memang ada. Seperti pada pasar inpres umumnya para pedagang mengeluh karena sedikitnya Konsumen yang datang. Begitu pula para konsumen mengeluh masalah transportasinya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihak pengurus pasar pernah mengusulkan kepada pihak Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) Jakarta Selatan, agar diberikan route kendaraan semacam bus metro mini. Akan tetapi usulannya itu sampai sekarang tidak pernah terwujud.

Transportasi yang ada hanya berupa ojek sepeda motor. Tidak semua orang menyenangi kendaraan tersebut. Apalagi para ibu rumah tangga, karena bila membawa barang-barangnya kerumah sedikit sekali yang terbawa. Hambatan lain yang tak kalah adalah Modal, dengan sedikit modal kebutuhan yang dijual juga sedikit dan tidak bervariasi.

Begitu pula pada musim hujan, jalan menuju pasar agak “becek” dan keadaan lantai pasar menjadi kotor. Konsumen jarang yang berbelanja kepasar inpres ini. Akhirnya konsumen lebih baik pergi kepasar Minggu maupun pasar Blok M. Karena kedua pasar tersebut suasananya agak nyaman dan bersih.

Dan yang paling penting faktor ini adalah letak pasar yang kurang strategis. Memang umumnya pasar inpres letaknya jauh dari jalan Protokol atau jalan Raya kelas satu.

Pasar inpres maupun pasar-pasar yang dikelola oleh P.D. Pasar Jaya kurang dapat bersaing dengan pasar-pasar yang dikelola oleh swasta, seperti pasar-pasar swalayan, Deptemen Store. Hal ini merupakan salah satu kenyataan yang ada.

Adapun KSU Jagakarsa juga mempunyai kendala (Hambatan) dalam eksistensinya. Kendala umum yang juga dialami oleh Koperasi-koperasi lainnya adalah para anggotanya hanya ingin menuntut haknya, seperti meminjam. Sedangkan kewajibannya, seperti membayar iuran mereka tidak melaksanakannya.

Memang sebagaimana telah diketahui bahwa modal koperasi berasal dari simpanan pokok dan iuran lainnya para anggotanya. Uang tersebut dijadikan satu yang menjadi modal bersama. Bila para anggotanya kurang sadar dalam kewajibannya niscaya koperasi itu akan mundur dan hancur.

Disamping itu pula hambatannya adalah anggota bila membeli barang, tidak dengan tunai. Kalau mereka mempunyai uang mereka belanja ditoko lainnya, bukan di Koperasi. Hal ini menyebabkan perputaran uang Koperasi menjadi tidak lancar

Hambatan dari luar Koperasi adalah kadang kala harus membayar "Fee" sebesar 5% kepada pusat Koperasi Serba Usaha. Bentuk semacam ini merupakan faktor yang merusak perkoperasian di Indonesia. Akan tetapi KSU Jagakarsa tidak mau membayar fee tersebut. Karena KSU Jagakarsa ini pernah ingin meminjam ke pusat KSU itu sendiri. Ternyata usulan peminjaman itu tidak diluluskan. Wal hasil modal KSU Jagakarsa ini pernah distort kepusat KSU sebesar Rp. 3,5 Juta; yang merupakan uang simpanan (Titipan).

4.2. Faktor Pendukung.

Untuk kelancaran perekonomian masyarakat wilayah Jagakarsa pemerintah DKI Jakarta membangun sarana jalan, pasar. Dengan pengerasan jalan, diharapkan kelancaran masyarakat dalam aktifitasnya, baik sebagai pegawai, pedagang, petani, dsb. Begitu pula dengan adanya pasar, para petani dapat menjajakan hasil buminya dan juga para ibu rumah tangga dapat membeli kebutuhan hidup sehari-harinya.

Keamanan dan kebersihan merupakan penunjang kebersihan bagi suatu pasar. Hal ini semacam diterapkan di pasar inpres "Lenteng Agung". Disamping itu pula disediakan tenaga buruh panggul untuk mengangkat barang-barang yang jumlahnya 11 orang, yang dikepalai oleh bapak Amit Rahim.

Dalam menjaga kebersihan pasar, diadakan kerja bakti sebulan sekali. Kerja bakti ini dilakukan oleh pedagangnya sendiri, pengurus pasar, dan buruh panggul. Dengan adanya kerja bakti tersebut.

Sedangkan dalam menjaga keamanan, pengurus pasar bekerja sama dengan petugas Polri dan bagian Binmas, dan Kodim (Babinsa). Dengan adanya kejasama pada petugas keamanan dan para pedagang sendiri, keamanan pasar menjadi kenyataan.

Adapun yang menunjang Koperasi (KSU) Jagakarsa ini adalah mempunyai tempat dipinggir jalan raya Jagakarsa. Dan ini didukung oleh pihak Kelurahan dimana Lurah sebagai penasehatnya.

Dukungan lainnya adalah kehampaan para pengurus, termasuk adanya manajer, dan dukungan para anggota meskipun hanya beberapa puluh orang yang aktif.

BAB V

DESKRIPSI DI LINGKUNGAN KEAGAMAAN

Perkembangan sejarah dan kebudayaan Indonesia tidak bisa lepas begitu saja dari sentuhan pengaruh agama-agama yang ada dan berkembang di Indonesia. Mula-mula agama yang datang ke Indonesia adalah agama Hindu, kemudian disusul oleh agama Budha, agama Islam, dan agama Kristen baik Protestan maupun Katolik. Disamping itu ada agama Kong Hu Cu yang dibawa oleh masyarakat Cina yang akhirnya menetap di Indonesia (Djohan Efendi, 1978:12).

Kehadiran agama-agama besar tersebut terutama Hindu, Budha, dan Islam tidak saja bersifat kerohanian, melainkan juga secara fisik dan politis dalam wujud berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu, Budha, dan Islam. Ini dapat dilihat bekas peninggalannya, seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, Masjid Demak, dsb.

Kenyataan hidup dan berkembangnya berbagai agama tersebut, menambah corak kemajemukan bangsa Indonesia. Suatu hal yang menggembarakan adalah bahwa walaupun kemajuan itu mengandung potensi pertentangan, namun dalam sejarah Indonesia tidak pernah terjadi perang antar agama. Sikap toleransi pemeluk berbagai agama benar-benar merupakan suatu kenyataan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kenyataan tersebut ada yang mengatakan hanya Indonesialah salah satunya mampu mengklaim sebagai "tempat pertemuan agama-agama dunia" (J.V. Paassean M.SC, 1984:371).

Kenyataan di negara-negara lain, seperti di Irlandia antara kelompok Katolik bentrok dengan kelompok Protestan. Begitu juga di India kelompok Hindu bentrok dengan kelompok Islam, dan di Filipina kelompok Islam dianak

tirikan oleh kelompok Katolik. Begitu juga di Burma dan Thailand kelompok Islam tidak diberlakukan secara wajar oleh kelompok Budha. Bahkan akhir-akhir ini kelompok Islam dikejar-kejar dan diperangi oleh kelompok Kristen Ortodoks di Bosnia-Hezegovina yang merupakan bekas negara Federal Yugoslavia.

Kerukunan hidup beragama merupakan salah satu tujuan pembangunan dibidang agama. Dalam hal ini negara menjamin kehidupan beragama bagi rakyatnya. Hal ini termuat dalam UUD 1945, pasal 29, tentang agama, yaitu:

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk mengatur tentang Keagamaan, maka pemerintah membentuk suatu departemen agama dimana ada 6 agama yang di akui yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha (Gavin W. Jones, 1978:48).

Sementara itu ada kelompok masyarakat Indonesia yang tidak menganut salah satu agama yang diakui oleh negara, dalam hal ini Departemen agama. Mereka itu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kelompok ini merupakan bagian dari bangsa Indonesia, maka pemerintah berkewajiban untuk melindungi seluruh warga dan tumpah darahnya, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahu 1978, masalah kepercayaan terhadap Tuhan dimasukkan kedalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1978, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) antara lain ditetapkan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan Agama. Pembinaan terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dilakukan.

- a. Agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru.
- b. Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan YME menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam sarasehan Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dirumuskan bahwa Kepercayaan Terhadap Tuhan YME sebagai pernyataan

dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan terhadap Tuhan YME atau peribadatan serta pengamalan budi luhur (Dep,Dik,Bud, 1989/1990:9).

Oleh karena itu penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME ini bukan dikategorikan agama, tetapi sebagai warisan budaya nenek moyang bangsa Indonesia. Maka pembinaannya dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q Direktorat Jendral kebudayaan. Pembinaannya dilakukan oleh instansi terkait seperti dari instansi Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI.

5.1. Faktor Penghambat.

Secara umum kehidupan dan pergaulan umat berbagai agama tampak rukun akan tetapi hal ini tidak berarti tidak pernah terjadi ketegangan atau persinggungan satu sama lain. Ketegangan dan persinggungan itu wajar saja dalam suatu masyarakat yang beraneka. Jangankan antar agama satu sama lain, sesama agamapun persinggungan sering terjadi, terutama persepsi masalah yang tidak prinsipil, seperti pertentangan kelompok "tradisional" NU dengan kelompok madrasah Muhammadiyah, itu pada masa-masa lalu. Sebab bagaimanapun juga, dalam masyarakat majemuk pasti terdapat persaingan, dan justru dalam persaingan itu terdapat dinamika.

Walaupun ketegangan dan persinggungan tersebut dapat dianggap wajar, namun suatu ketika dapat terjadi peruncingan yang tak terkendalikan. kemungkinan peruncingan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain masalah penyebaran agama, serta masalah kompleks mayoritas dan minoritas.

Penyebaran agama adalah hal yang wajar dan semestinya. Agama Islam dan Kristen misalnya sangat mementingkan hal itu. Agama Islam sebagai agama mayoritas bangsa Indonesia, dimana sebagian pemeluknya masih tertinggal dari kelompok agama lain dalam hal pengetahuan dan ekonominya. Sedangkan kelompok Kristen yang merupakan "warisan" kolonial keadaan pengetahuan dan ekonominya relatif cukup. Kadang kala masalah kebodohan dan kemiskinan umat Islam ini dipergunakan oleh kelompok agama tertentu untuk menarik kedalam agamanya. Keadaan tersebut dapat membuat ketegangan antara kelompok Islam dengan kelompok agama yang "ekspansif" itu.

Adanya penyebaran agama oleh kelompok agama tertentu terhadap kelompok yang sudah beragama, seperti mendatangi rumah demi rumah

penduduk agama lain, akan menimbulkan ketegangan antar pemeluk agama. Walaupun dalam kenyataan cara-cara tersebut hanya satu-dua kelompok kecil, akan tetapi masyarakat awam cenderung untuk memukul rata (Generalisasi).

Dalam kehidupan beragama di Kelurahan Jagakarsa nampaknya tidak di temui hambatan-hambatan. Bahkan interaksi antara kelompok agama dalam bermasyarakat berjalan baik. Kenyataan ini merupakan adanya toleransi para pemeluk agamanya. Dan ini harapan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat lain.

Apalagi masyarakat Kelurahan Jagakarsa pemeluk agama Islamnya 90%, toleransi terhadap pemeluk agama lainnya besar. Karena masalah toleransi merupakan salah satu ajaran Islam, sebagaimana yang termaktub dalam kitab sucinya (Al Qur'an, surat 109).

Memang bangunan ibadat (kebaktian) agama di luar Islam tidak terdapat di kelurahan Jagakarsa ini, akan tetapi para pemeluk agama di luar Islam itu tidak dihalangi dalam menjalankan kewajibannya. Biasanya mereka dalam menjalankan kebaktiannya pergi ke wilayah lain, seperti ke wilayah Kelurahan Srengseng Sawah, atau Cilandak bagi yang beragama Katolik dan Protestan.

Dengan keadaan yang demikian itu masalah-masalah hambatan keagamaan bagi warganya, nampaknya dapat diatasi oleh masing-masing pemeluknya. Bila ditemukan adanya hambatan keagamaan, biasanya pihak pemerintah, dalam hal ini aparat keamanan akan turun langsung. Karena masalah tersebut merupakan salah satu yang dapat menggocangkan stabilitas keamanan, yang biasanya di kategorikan sebagai masalah SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).

5.2. Faktor Penunjang

Salah satu perkembangan tentang keagamaan Indonesia setelah merdeka adalah bahwa masing-masing umat beragama mempunyai semacam puncak organisasi, setidaknya-tidaknya bertindak berdiri diatas kelompok umat. Umat Islam mempunyai wadah organisasi "Majelis Ulama Indonesia", kelompok protestan mempunyai Dewan Gereja-Gereja Indonesia, Kelompok Katolik mempunyai Majelis Agung Wali Gereja Indonesia. Kelompok Hindupun mempunyai wadah organisasinya yaitu "Parisada Hindu Dharma", dan kelompok Budha mempunyai Majelis Agung Agama Budha Indonesia, (Djohan Efendi, Loc. cit:13).

Untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, biasanya pemerintah dalam hal ini Departemen Agama mengadakan dialog antar pemuka agama. Ini pernah terjadi pada tanggal 30 November 1967 dimana pada waktu itu hubungan atau ummat Islam dengan Kristen terjadi ketegangan. Sumber ketegangannya adalah pada isu pengkristenan (Kristenisasi) dikalangan umat Islam. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menyelenggarakan Musyawarah antar agama dengan target, pertama kesepakatan untuk tidak menjadikan umat agama lain sebagai sasaran penyiaran suatu agama; kedua adanya kesepakatan untuk membentuk semacam badan Konsultasi antar Agama. Musyawarah antar agama tersebut tidak mencapai seperti yang diharapkan terutama yang menyangkut target pertama (Djohan Efendi, *ibid*: 14).

Dengan adanya keterbukaan antar sesama pemeluk agama yang dengan pemeluk agama lainnya setiap persoalan dapat diatasi dengan jalan melakukan dialog atau musyawarah. Biasanya ini dilakukan pada tingkat kepengurusan organisasi keagamaan atau pada organisasi kemahasiswaan, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Keristen Indonesia (GNKI), Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

Biasanya kelompok Mahasiswa itu yang juga disebut sebagai "kelompok Cipayang" yang merupakan kader-kader bangsa, sering melakukan pertemuan sesama mereka. Pada tingkat ini mereka tidak mempersoalkan agama masing-masing dalam memikirkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Disamping itu pemerintah ikut membantu didalam pembinaan kerukunan umat beragama, dan juga membantu membangun sarana keagamaan, seperti pembangunan masjid, gereja, pura dan vihara.

Khususnya bagi umat islam, pemerintah membangun sarana ibadah seperti masjid melalui Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Dana tersebut diambil dari potongan gaji pegawai negeri yang beragama islam. Sudah ratusan Masjid yang dibangun dari yayasan tersebut yang juga diketuai oleh Presiden Soeharto.

Semangat keagamaan di Indonesia dapat dilihat dengan jelas. Masjid, Gereja dan tempat-tempat ibadah umat beragama lainnya dipenuhi oleh umatnya. Di DKI Jakarta pun gairah umat beragama dalam mengunjungi tempat beribadah (kebaktian) terutama pada hari Jum'at, mesjid-mesjid dipenuhi oleh umat jamaahnya. Begitu pula Gereja-Gereja dipadati jamaahnya.

Kehidupan beragama di wilayah Kelurahan Jagakarsa penuh semarak, terutama pemeluk agama Islam sebagai agama yang paling banyak dianut. Majelis Taklim sebagai tempat menambah ilmu pengetahuan agama khususnya, banyak jamaahnya. Begitupula masjid-masjid, maupun mushollah, juga penuh pada hari-hari tertentu, seperti sholat Jum'at, shalat Tarawih pada bulan Ramadhon. Sedangkan waktu-waktu lainnya tempat ibadah agak sepi akibat masyarakat sibuk bekerja.

Dengan adanya sikap saling menghargai antara umat beragama satu dengan umat beragama lainnya, atau juga yang disebut sikap toleransi, masyarakat Indonesia akan terlindungi dari keresahan sebagaimana yang dialami oleh negara-negara lainnya.

BAB VI

DESKRIPSI DI LINGKUNGAN POLITIK

Dalam membicarakan politik biasanya perhatian utamanya adalah kekuasaan. Kekuasaan merupakan daya kemampuan untuk membuat keputusan yang mengikat kolektipitas sosial yang bersangkutan dan para anggotanya serta memaksakan penyelenggaraan keputusan ini sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang terkait pada kedudukan (status) masing-masing.

Kekuasaan bangsa Indonesia didapatkan dari perjuangan bersenjata dan diplomasi (Sartono Kartodjo; 1981: 4) terhadap pihak penjajah Belanda yang ingin kembali lagi ke Indonesia. Karena sebelumnya, yaitu pada tanggal 17- Agustus 1945, bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Dari buah kemerdekaan inilah bangsa Indonesia dapat membangun bangsanya.

Dalam menata masyarakat, negara (pemerintah) menyusun alat-alat kekuasaan, seperti, UUD, Angkatan Bersenjata Republik Indanesia, Partai Politik, Birokrasi, dan sebagainya. Pada negara-negara moderen untuk meraih kekuasaan melalui partai politik.

Bagi Indonesia sendiri kehidupan parta politik sejak dikeluarkan Maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945 pusat (Daniel Dhakido, 1981:10). Maka sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tersebut, bertumbuh dan berlomba-lombalah setiap kelompok mendirikan partai politik.

Pada pemilihan umum pertama tahun 1955 hampir terdapat sebanyak 36 partai politik. Sedangkan yang mendapatkan kursi di parlemen dalam pemilihan umum hanya 27 partai, sisanya lagi tidak mendapatkan suara (kursi) di parlemen (Daniel Dhakhidae, *ibid* : 11).

Pada masa tersebut terjadi pergolakan politik yang ditandai oleh jatuh bangunnya kabinet. Begitu pula gerakan separatis didaerah-daerah sering terjadi. Puncak ketidak stabilan politik adalah peristiwa Lubang Buaya, yang dikenal dengan gerakan 30 September (G30S/PKI). Karena yang mendalangi peristiwa tersebut adalah Partai Komunis Indonesia (PKI).

Akhirnya gerakan tersebut dapat dipatahkan oleh ABRI dan masyarakat yang setia kepada ideologi nasional yaitu Pancasila. Dengan kegagalan PKI serta antek-anteknya, maka bangsa Indonesia memasuki dunia baru yang disebut masa Orde Baru.

Dalam masa awal Orde Baru tinggal 10 partai yaitu : Nahdlaul Ulama (NU), PNI, PSII, Parkindo, Partai Katolik, Perti, IPKI, Partai Muba, Parmusi dan Golkar. Dalam pemilu 1971, yang keluar sebagai pemenangnya adalah Golkar.

Untuk penataan lebih lanjut, maka partai tersebut disederhanakan jumlahnya menjadi 3 Parti, yaitu pertama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi dari partai-partai Islam seperti NU, PSII, Parmusi, dan Perti. Kedua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan fusi dari PNI, IPKI, Partai Murba, dan Partai Katolik. Sedangkan yang ketiga adalah Golkar (Golongan Karya).

Dalam pemilu tahun 1977 yang keluar sebagai pemenang adalah Golkar (Golongan Karya). Begitu pula Golkar sebagai pihak yang menang.

Adapun ABRI sebagai kekuatan sosial politik dengan dwi fungsinya tidak mengikuti pemilu, sebagaimana dalam pemilu tahun pertama 1955. Mereka diberi jatah kursi. Karena ABRI merupakan milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik kelompok atau golongan tertentu.

6.1. Faktor Penghambat.

Setelah Indonesia merdeka hambatan utama adalah bagaimana menata masyarakat agar menjadi lebih baik kehidupannya. Dalam hal ini politik masyarakat didesa-desa terkotak-kotak dalam partai yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketegangan. Apalagi sewaktu Partai Komunis Indonesia (PKI) masih diperkenankan oleh pemerintah, ketegangan didaerah merupakan kenyataan sehari-hari. Karena Ideologi partai tersebut bersifat revolusioner.

Desa-desa pada waktu itu merupakan arena perebutan massa antara satu partai dengan partai lainnya, bahkan tidak mustahil satu keluarga antara anak dengan orangtuanya berbeda dalam memilih partai.

PKI dengan aksinya yang didukung oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) melakukan tindakan mengambil tanah dari pemiliknya yang sah. Cara-cara semacam itu merupakan tindakan yang melanggar hukum (*Pusat Penelitian dan Study Pedesaan & Kawasan UGM*, 1982 : 46). Dengan dilarangnya PKI oleh pemerintah RI berdasarkan Surat Perintah 11 Maret 1966, maka rakyat dipedesaan berangsur-angsur mulai merasa aman.

Hambatan politik terutama pada masalah hak asasi masih dapat di temui didalam kehidupan sehari-hari. Karena adanya beberapa Undang-undang yang merupakan warisan kolonial Belanda masih berlaku, seperti Undang-Undang Subversi. Dengan masih berlakunya Undang-Undang tersebut, tampak ditinjau kembali apakah pasal-pasal nya sesuai dengan Pancasila, niscaya ruang gerak masyarakat menjadi terbatas.

Dengan adanya iklim keterbukaan, dan disahkannya Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN), kesewenang-wenangan oknum pejabat negara kadangkadangkang menyalah gunakan wewenangnya, dapat dibatasi atau dikurangi. Karena hambatan politik umumnya berasal dari yang mempunyai kekuasaan.

Pada masyarakat wilayah Jagakarsa tidak ditemui adanya hambatan-hambatan politik. Mereka dalam pemilu bebas memilih sesuai dengan pilihannya. Dan ini telah dijamin oleh Undang-Undang dimana asas pemilu itu adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER)

6.2. Faktor Penunjang

Setelah lahirnya Orde Baru, terutama tatanan masyarakat dan kenegaraan berfungsi kembali sabagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945, dimana sebelumnya yaitu pada masa Orde Lama telah terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Apalagi orde Baru secara komitmen akan menjalankan Pancasila Dan UUD 1945 secara murni dan Konsekwen, kehidupan bernegara diharapkan semakin menjadi lancar.

Tindakan yang diambil Orde Baru adalah seperti penyederhanaan partai, dan desa dijadikan "polotingsmass" atau masa mengambang. Karena dengan adanya konsep tersebut, diharapkan masyarakat di pedesaan tidak menjadi terkotak-kotak, sebagaimana pada masa lalu yaitu masa Orde Lama.

Yang tidak kalah pentingnya adalah UU No. 8 tahun 1985 yang isinya secara garis besar adalah bahwa setiap organisasi masyarakat harus

berasaskan Pancasila. Karena dengan dicantulkannya asas Pancasila ini, diharapkan tidak terjadi pertentangan antara ormas yang satu dengan lainnya.

Dengan adanya stabilitas Politik, pemerintah maupun masyarakat dapat membangun disegala aspek. Stabilitas politik ini pada masa Orde Lama boleh dibilang tidak ada. Bahkan yang ada ketidak stabilan.

Ini dapat dilihat masyarakat pelajar dapat menuntut, ilmu pengetahuan mulai dari sekolah TK sampai keperguruan Tinggi. Banyak sekolah yang sudah dibangun oleh pemerintah maupun masyarakat (swasta), bahkan jumlah sekolah yang dibangun oleh masyarakat lebih banyak jumlahnya dibandingkan sekolah yang dibangun oleh pemerintah.

Begitu pula dalam sektor ekonomi telah tersedia barang-barang kebutuhan hidup mulai dari yang primer sampai kepada yang mewah (Lux). Pasar maupun Koperasi sebagai tempat orang untuk mencari barang-barang keperluan hidup itu. Pabrik sebagai tempat pemrosesan barang-barang telah banyak dibangun.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Masyarakat Jakarta merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai macam golongan etnik, golongan pendidikan, golongan ekonomi, golongan agama, dan golongan politik yang berbeda latar belakang sejarah dan kebudayaannya. Dengan demikian Jakarta merupakan “miniatur Indonesia”.

Peranan pendidikan dalam pembinaan Kebudayaan Nasional di DKI Jakarta, dan khususnya di Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan seperti halnya di daerah lain yang ada di DKI Jakarta. Peranan pendidikan ini sangat strategis dalam upaya menanamkan nilai-nilai budaya bangsa. Meskipun masyarakat Jakarta itu majemuk, akan tetapi didalam terinteraksi mereka menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, baik dilingkungan sekolah, kantor pemerintah maupun swasta, pasar, dan tempat-tempat umum lainnya.

Ada pula sebagian warga masyarakat Jakarta yang menggunakan bahasa daerah, dan biasanya digunakan dengan teman yang sama etnisnya. Penggunaan bahasa daerah sebagian alat komunikasinya ini supaya menjadi lebih akrab. Penggunaan bahasa daerah ini biasanya dilakukan oleh orang-orang dewasa atau orang-orang yang dilahirkan dan dibesarkan di daerah masing-masing.

Sedangkan orang-orang yang dilahirkan dan dibesarkan di DKI Jakarta, umumnya alat komunikasinya menggunakan bahasa Indonesia dialek Jakarta. Kadang kadang di dalam berkomunikasi tersebut dicampur dengan sedikit bahasa asing.

Didalam lingkungan pendidikan usaha pembinaan kebudayaan nasional hampir tidak mengalami adanya hambatan. Akan tetapi yang menjadi kendala

adalah letak sekolah-sekolah tersebut agak jauh dari jalan raya yang dilalui oleh kendaraan umum sebagai alat transportasi pelajar. Bahkan pada masa kini biaya pendidikan terasa mahal sekali. Sehingga dikit sekali pelajar yang dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi. Dan yang tak kalah pentingnya adalah setelah mereka tamat belajar, mereka tidak langsung bekerja. Karena lapangan kerja sangat terbatas. Akibatnya hanyalah pengangguran intelektual. Bila hal ini tidak dicarikan jalan keluarnya, akan mengganggu stabilitas nasional.

Dilingkungan ekonomi hambatan yang terasa umumnya dialami oleh golongan ekonomi lemah. Lingkungan usaha mereka kurang sekali, seperti letak usaha mereka bukan ditempatnya yang strategis, seperti didekat jalan protokol. Akibatnya konsumen jarang sekali yang berbelanja. Disamping itu pula alat transportasi kurang mendukung.

Sebagaimana diketahui bahwa kredit dari perbankan, lebih banyak dinikmati oleh kaum konglomerat etnis cina dibandingkan oleh kaum pribumi yang ekonominya lebih lemah. Akibatnya adalah para konglomerat cina ini menjadi semakin kaya, sedangkan kaum pribumi menjadi semakin tidak berdaya.

Dampak dari pemberian kredit lebih banyak diberikan kepada konglomerat cina ini dimana kredit tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, seperti perluasan usaha yang lebih produktif (perluasan pabrik) yang dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja. Para konglomerat ini hanya mengembangkan usaha-usaha baru, seperti pembangunan apartemen dan hotel yang selanjutnya akan disewakan

Usaha penyewaan apartemen dan hotel itu dapat dibilang sudah tidak produktif lagi, karena sudah menjamurnya bisnis usaha tersebut. Akibatnya adalah banyak kredit bank yang macet. Dampak yang lebih jauh lagi adalah perputaran ekonomi menjadi lebih lamban dan kredit bank menjadi lebih sulit dan mahal.

Secara empiris perekonomian ini sudah didominasi oleh etnis cina mulai dari tingkat produksi, grosir, agen sampai pengecer sudah dipegang olehnya. Dan yang lebih menyakitkan adalah bila sipedagang dari etnis cina itu memperoleh barang dagangannya, dapat diutangkan. Sedangkan pedagang pribumi bila mendapatkan barang dagangannya, harus tunai. Keadaan semacam ini pihak pribumi akan semakin tersingkir dari percaturan ekonomi, nasional dan menjadi kaum pinggiran (Kaum penonton).

Keadaan semacam ini bila dibiarkan oleh pemerintah, tidak mustahil akan terjadi keresahan sosial atau revolusi sosial. Karena bagaimanapun juga yang menjadi tuan rumah ini, entah itu dibidang ekonomi sosial, politik, budaya dan lain-lain haruslah pihak pribumi ini yang menjadi pengemudinya (aktornya) dengan dukungan penuh pihak pemerintah.

Begitu pula dalam pengembangan koperasi mengalami kendala. Umumnya kendala Koperasi adalah kesadaran para anggota kurang sekali. Para anggota Koperasi umumnya menuntut hak, tanpa diimbangi kewajibannya.

Yang lebih menjadikan lagi adalah adanya ekonomi pembina dari instansi pemerintah yang minta dilayani dari pengurus koperasi yang seharusnya mereka itu melayani urusan perkoprasian.

Dilingkungan keagamaan boleh dibilang tidak mengalami hambatan bah kehidupan keagamaan terasa semarak sekali . Kerukunan beragama berjalan baik sekali. Hal ini disebabkan para pemimpin umat tiap-tiap agama di tingkat pusat baik ada masalah-masalah yang akan memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa, mengadakan musyawarah untuk mencari jalan keluarnya. Karena masalah agama ini adalah menyangkut masalah "SARA", maka penanganan masalah ini biasanya sudah diantisipasi oleh instansi yang terkait dengan lembaga-lembaga Keagamaan yang ada.

Dalam lingkungan politik sejak kelahiran Orde Baru, kestabilan dalam hal kekuasaan pemerintah menjadi semakin nyata. Ini dapat dilihat dari Pemilihan Umum (Pemilu) setiap 5 tahun sekali berjalan dengan aman dan lancar. Begitu pula aparat birokrasi sudah tidak terkotak-kotak lagi seperti halnya pada masa Orde Lama.

Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam bermasyarakat dan bernegara yang wajib dicantumkan bagi setiap organisasi masyarakat (Ormas) maupun organisasi politik (Orpol), menjadikan kehidupan sosial politik semakin lancar. Ini merupakan salah satu prestasi dari Orde Baru dalam membangun masyarakat Indonesia menuju apa yang dicita-citakan. Karena pada masa sebelumnya, setiap ormas dan orpol seringkali disibukkan hanya pada masalah asas. Sehingga untuk melangkah lebih jauh seperti menjalankan program-programnya yang di gariskan oleh ormas maupun orpol itu kurang terlaksana.

Dengan adanya stabilitas politik, pengembangan dilingkungan pendidikan, ekonomi, keagamaan dan kegiatan lainnya menjadi semakin

mudah. Memang disana-sini masih ada hambatan-hambatan seperti kurang jelasnya perlindungan bagi rakyat kecil dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Adanya penyelewengan kekuasaan oleh oknum-oknum tertentu, menyebabkan negara dirugikan.

7.2. Saran

Untuk meningkatkan peran pendidikan dalam pembinaan Kebudayaan nasional di DKI Jakarta ini, khususnya di kelurahan Jagakarsa, kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan maupun daerah DKI Jakarta lainnya adalah :

- a. Di lingkungan pendidikan, khususnya sekolah dimana letaknya yang jauh dari jalan raya yang dilalui oleh kendaraan umum, pihak pemerintah mewajibkan kendaraan umum untuk mengangkut para pelajar. Karena dalam kenyataan sehari-hari banyak kendaraan umum (ompangan) tidak mau mengangkut para pelajar yang akan pergi dan pulang sekolah. Karena ongkos para pelajar hanya setengah dari ongkos non pelajar. Begitu pula masih adanya guru yang statusnya honorer agar pemerintah mengangkatnya sebagai guru tetap (menjadi pegawai negeri sipil).
- b. Di lingkungan ekonomi terutama golongan ekonomi lemah dan pasar inpres agar diberikan kredit yang murah dan membangun pasarnya setaraf dengan pasar-pasar Swalayan atau departement store. Dengan demikian diharapkan omset para pedagang menjadi meningkat dan semakin berkembang. Begitu pula dibidang Koperasi agar diberikan fasilitas yang lebih luas lagi. Diharapkan dengan adanya bantuan pemerintah tersebut, koperasi dapat berkembang sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.
- c. Dilingkungan keagamaan agar pemerintah semakin menggalakan dialog antar para pemimpin agama. Dengan adanya dialog tersebut, diharapkan bila ada isu yang beredar dimasyarakat yang menyebabkan akan terjadi perpecahan akan dapat diekminir dan selanjutnya masyarakat dapat menjadi tenang kembali.
- d. Dalam lingkungan politik untuk lebih bergairah lagi, pihak pemerintah keamanan hendaknya meningkatkan pendekatan stabilitas sebagai satu-satunya pendekatan. Hal ini disebabkan pendekatan tersebut sudah kurang mampu lagi dalam arus globalisasi. Pendekatan musyawarah mufakat dan demokrasi merupakan metode yang paling sesuai pada saat ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anderson, C. Arnold. "Modernisasi Pendidikan", *Modernisasi dinamika pertumbuhan*, Myron Weiner, Voice Of America Forum Lectures, t.t.
- Arief Sritua, Adi Sasono, *Indonesia : Ketergantungan dan Keterbelakangan*, Jakarta, Lembaga Studi Pembangunan, 1981.
- Beals Ralph L, and Harry Hoijer, *An Introduction to anthropology*, New York, The Mac Millan Company, 1959.
- Benda Harry J, *Bulan Sabit dan Matahari terbit : Islam di Indonesia pada masa pendudukan Jepang*, Terj. Daniel Dhakidae, jakarta, Pustaka Jaya, 1980.
- Depdikbud, *Pedoman Teknis Pembinaan Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 1989/1990*
- Dhakidae Daniel, "Partai politik dan sistem kepartain", *Prisma*, No. 8 Agustus 1981
- Dhofier Zamahsyarari, *Tradisi Pesantren : Studi tentang Pandangan hidup Kyai*, Jakarta, LP3ES, 1982.
- Effendi Djohan, "Dialog antar agama : bisakah melahirkan teologi kerukunan?", *Prisma*, No. 5, Juli 1978.
- Gordon Alec, "Ideologi, ekonomi dan perkebunan : runtuhnya sistem gula kolonial dan merosotnya ekonomi Indonesia merdeka", *Prisma*, No. 7 Juli 1982.
- Jones W. Gavin, "Agama-agama di Indonesia : sejarah dan perkembangannya ", *Prisma*, No. 5, Juli 1978.
- Kartodirdjo Sartono, et.al, *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid V, VI, Jakarta, Balai Pustaka 1976.
-
- "wajah revolusi Indonesia dipandang dari perspektivisme struktural", *Prisma*, no. 8, Agustus 1981.

- Koentjaraningrat, *Pengantar ilmu Antropologi*, Jakarta, aksara baru, 1986.
- Kunio Yoshihara, *Kapitalisme semu di Asia Tenggara*, Jakarta, LP3ES, 1991
- M.D. Sagimun, *Jakarta dari tepian air ke kota proklamasi*, Dinas Museum dan Sejarah Pemda DKI Jakarta, 1988
- Noer Deliar, *Gerakan moderen Islam di Indonesia 1900 - 1942*, Jakarta, LP3ES, 1980
- Paassen, J.V, "Kerjasama antara agama dan prospeknya : Kasus Sulawesi Selatan", *Masalah-masalah pembangunan*, Koentjaraningrat (Penyunting), Jakarta, LP3ES, 1984.
- Pringgodigdo, A.K, *Sejarah pergerakan rakyat Indonesia*, Jakarta, Dian rakyat, 1980
- Pusat penelitian dan Studi Pedesaan & kawasan UGM, *Keresahan pedesaan pada tahun 1960-an*, Jakarta, Yayasan Pancasila Sakti, 1982.
- Robinson Richard, *Sejarah Politik Orde Baru*, Jakarta, Lembaga Study Pembangunan, 1984.
- Sasono Adi, "Indonesia, dari ekonomi terpimpin ke Kapitalisme terpimpin", *Prisma*, no.1 Januari 1982.
- Suryo Djoko, "Sektor swasta dalam perspektif sejarah", *Prisma*, no. 10, Oktober 1986.
- Van Niel Robert, *Munculnya Elit modern Indonesia* terj. NY. Zahara Deliar Noer. Jakarta, Pustaka Jaya, 1984.
- Wahid Abdurrahman, "Kata pengantar pembebasan melalui pendidikan: Punyakah Keabsahan?", *Pendidikan sebagai praktek pembebasan*, Paulo Freire. Jakarta, Gramedia 1984.
- Wibisono Christianto, "Antara mitos dan fakta", *Prisma*, no. 4, April 1981.

DAFTAR RESPONDEN

1. Nama Kepala Keluarga : Komardinata
Agama : Islam
Suku Bangsa : Sunda
Pendidikan : STM
Pekerjaan : Dagang
Tempat Tinggal : RT 003/05, Kel. Jagakarsa.

2. Nama Kepala Keluarga : Haji Ali
Agama : Islam
Suku Bangsa : Betawi
Pendidikan : Madrasah
Pekerjaan : Dagang
Tempat Tinggal : RT 003/02, Kel. Jagakarsa

3. Nama Kepala Keluarga : Amrul Sanjaya
Agama : Islam
Suku Bangsa : Palembang
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : PNS (Sek. Kelurahan)
Tempat Tinggal : RT 007/07, Kel. Jagakarsa.

4. Nama Kepala Keluarga : Massan, HM
Agama : Islam
Suku Bangsa : Betawi
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : PNS (Staf Kelurahan)
Tempat Tinggal : RT 009/05, kel. Jagakarsa.

5. Nama Kepala Keluarga : Abdul Latif Hasibuan
Agama : Islam
Suku Bangsa : Batak
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Dagang
Tempat Tinggal : RT 004/04, Kel. Lenteng Agung.

6. Nama Kepala Keluarga : Haji Abd. Syukur
 Agama : Islam
 Suku Bangsa : Betawi
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Dagang
 Tempat Tinggal : RT 006/06, kel. Lenteng Agung.
7. Nama Kepala Keluarga : Amit Rahim
 Agama : Islam
 Suku Bangsa : Betawi
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Buruh
 Tempat Tinggal : RT 005/03, Kel. Srengseng Sawah
8. Nama Kepala Keluarga : Sutarman
 Agama : Islam
 Suku Bangsa : Jawa
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Eks. ABRI (Kepala Pasar)
 Tempat Tinggal : Kebun Jeruk.
9. Nama Kepala Keluarga : Drs. Safrudin
 Agama : Islam
 Suku Bangsa : Betawi
 Pendidikan : Perguruan Tinggi (sarjana)
 Pekerjaan : Guru
 Alamat : Pondok Cina, Depok.
10. Nama Kepala Keluarga : Hidayat
 Agama : Islam
 Suku Bangsa : Sunda
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Manejer Koperasi KSU
 Alamat : RT 006/04, Kel. Jagakarsa.

11. Nama Kepala keluarga : Syafruddin
 Agama : Islam
 Suku Bangsa : Betawi
 Pendidikan : PGAA
 Pekerjaan : Guru Agama (guru sekolah)
 Tempat Tinggal : RT.009/02, Kel Jagakarsa
12. Nama Kepala Keluarga : Drs. Taufik Hidayat
 Agama : Islam
 Pendidikan : Sarjana
 Pekerjaan : Guru Agama (guru sekolah)
 Tempat Tinggal : RT. 009/02 Kel. Jagakarsa
13. Nama Kepala Keluarga : Drs. H. Rahmat
 Agama : Islam
 Suku Bangsa : Betawi
 Pendidikan : Sarjana
 Pekerjaan : Guru Agama (guru sekolah)
 Tempat Tinggal : RT 006/ 02, Kel. Jagakarsa.
14. Nama kepala keluarga : Hajjah Siti
 Agama : Islam
 Suku Bangsa : Betawi
 Pendidikan : Madrasah
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Tempat Tinggal : RT. 003/02 Kel. Jagakarsa.
15. Nama Kepala Keluarga : Listiawati
 Agama : Islam
 Suku Bangsa : Jawa
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Dagang
 Tempat Tinggal : RT 003/05, Kel. Jagakarsa

16. Nama Siswa : Chitra Suryawijaya
Agama : Islam
Suku Bangsa : Palembang
Status : Pelajar SMAN 49
Tempat Tinggal : RT 001/ 07, Kel. Kebagusan
17. Nama Siswa : Zubaidah
Agama : Islam
Suku Bangsa : Betawi
Status : Pelajar Madrasah
Tsanawiyah Negri (MTSN) Filial 2
Tempat Tinggal : RT 009/02, Kel. Jagakarsa
18. Nama Siswa : Budi Utomo
Agama : Islam
Suku Bangsa : Jawa
Status : Pelajar SMAN 49
Tempat Tinggal : RT 004/03, Kel. Jagakarsa
19. Nama Siswa : Nunung Aminah
Agama : Islam
Suku Bangsa : Sunda
Status : Pelajar SMPN 166
Tempat Tinggal : RT 004/01, Kel. Jagakarsa.
20. Nama Siswa : Anastasia Yulianti
Agama : Kristen
Suku Bangsa : Jawa
Status : Pelajar SMPN 166
Tempat Tinggal : RT 006/03, Kel. Jagakarsa.



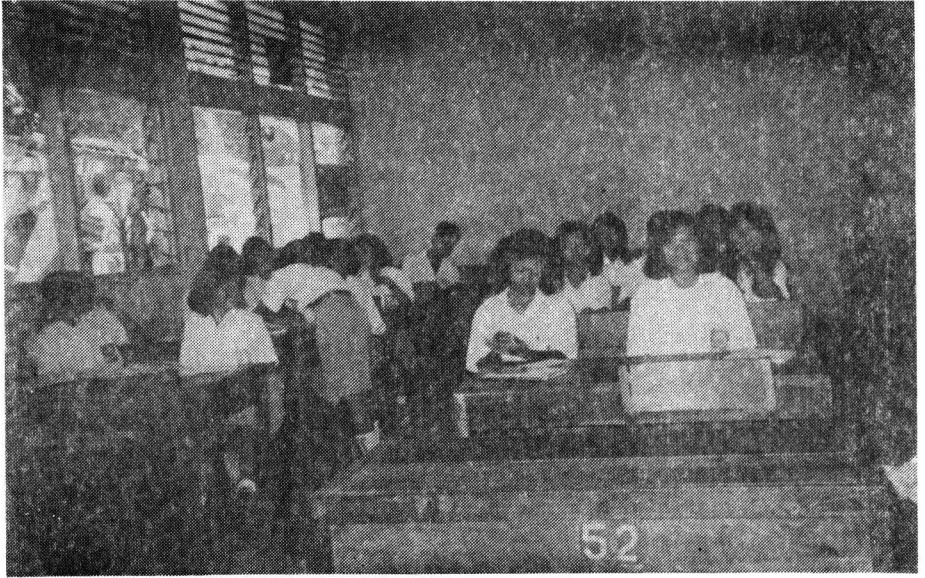
Gambar 1.

Nampak para murid SD sedang melakukan kegiatan kepramukaan

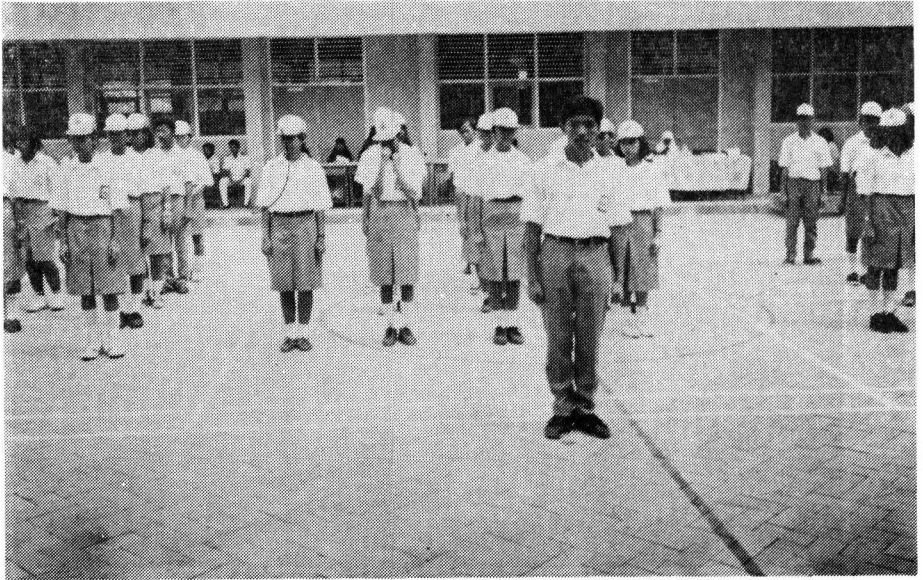


Gambar 2.

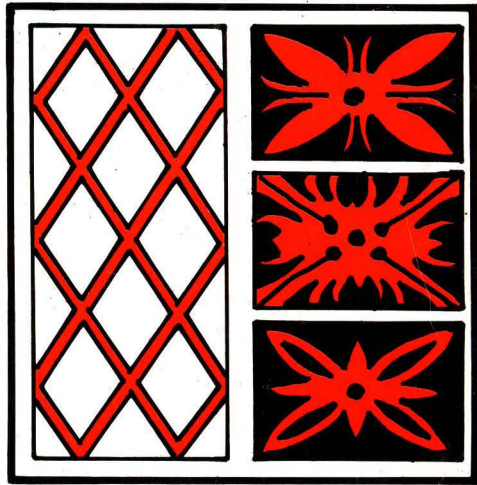
Beberapa murid SMP ini sedang "ngeceng" pada sebuah taman



Gambar 3.
Suasana kelas pada sebuah SMA



Gambar 4.
Para pelajar SMA sedang melakukan upacara bendera



Perpustakaan
Jenderal
3
M